



**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH MINIMUM  
PROVINSI DAN INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE 1997-2014**

**SKRIPSI**

Oleh

**Retno Ayu Wulansari  
NIM 110810101097**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH MINIMUM  
PROVINSI DAN INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE 1997-2014**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh

**Retno Ayu Wulansari  
NIM 110810101097**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sunarti dan Ayahanda Gatut Sutyatmoko yang tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta segala pengorbanan selama ini;
2. Kakakku Sigit Prasetyo dan Galuh Yunita Ardi Ningsih, Adikku Dimas Agung Pamungkas yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh  
(Confusius)

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang  
(William J. Siegel)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Ayu Wulansari

NIM : 110810101097

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Hubungan Kausalitas antara Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia periode 1997-2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2015

Yang menyatakan,

Retno Ayu Wulansari  
NIM 110810101097

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH MINIMUM  
PROVINSI DAN INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE 1997-2014**

Oleh

Retno Ayu Wulansari

NIM 110810101097

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Zainuri, M.Si

Dosen Pembimbing II : Dr. Regina Niken W., SE, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH  
MINIMUM PROVINSI DAN INFLASI DI INDONESIA  
PERIODE 1997-2014**

Nama Mahasiswa : Retno Ayu Wulansari

NIM : 110810101097

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Moneter

Tanggal Persetujuan : 13 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zainuri, M.Si  
NIP. 19640325 198902 1 001

Dr. Regina Niken Wilantari, SE., M.Si  
NIP. 1974 0913 2001 12 2 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH MINIMUM PROVINSI DAN  
INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1997-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Retno Ayu Wulansari

NIM : 110810101097

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

12 Juni 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. (.....)  
NIP. 196411081989022001
2. Sekretaris : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. (.....)  
NIP. 195812061986031003
3. Anggota : Teguh Hadi Priyono, SE., M.Si. (.....)  
NIP. 197002061994031002
4. Pembimbing I : Dr. Zainuri, M.Si (.....)  
NIP. 19640325 1989021001
5. Pembimbing II : Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si. (.....)  
NIP. 197409132001122001

Foto 4 X 6  
warna

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si  
NIP. 19630614 1 199002 1 001

*Hubungan Kausalitas Antara Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia  
Periode 1997-2014*

**Retno Ayu Wulansari**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara inflasi di Indonesia dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa. Kondisi inflasi dan upah di Indonesia saat ini masih mengalami fluktuasi yang menjadi permasalahan untuk Indonesia dimana penetapan upah di masing-masing wilayah Indonesia berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode kausalitas granger untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel penelitian. Hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah ditemukan hubungan searah antara UMP Wilayah Jawa dan inflasi Indonesia pada Lag 5. Pada Wilayah Luar Jawa ditemukan tidak terdapat hubungan kausalitas antara upah dan inflasi Indonesia. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menstabilkan inflasi serta penetapan upah minimum yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang terdapat pada wilayah Indonesia yang bertujuan sebagai pemerataan kesejahteraan penduduk.

**Kata kunci:** Inflasi, UMP Jawa, UMP Luar Jawa, dan Kausalitas Granger.

*Causality Relationship Between the Province of Minimum Wage and Inflation in  
Indonesia Period 1997-2014*

**Retno Ayu Wulansari**

*Department of Economics and Development Study, the Faculty Economics, Jember  
University*

**ABSTRACT**

*Inflation is one of the economic problems faced by Indonesia. This study discusses the relationship between inflation in Indonesia and the Province of Minimum Wage (UMP) Region Java and outside Java. Condition wage and inflation in Indonesia is still experiencing fluctuations become a problem for Indonesia where wage determination in each of Indonesia is different according to the condition of the region. In this study using granger causality method to determine the relationship between the two variables of the study. The results obtained from this analysis is found unidirectional relationship between the UMP and inflation of Java Indonesia on Lag 5. On the Outer Region found there is no causal relationship between wages and inflation in Indonesia. The results were found from this study can be considered by the government in making policy in stabilizing inflation and minimum wages in accordance with the conditions of the resources contained in the Indonesian region aimed as equitable welfare of the population.*

**Keywords:** *Inflation, Java UMP, UMP outside Java, and Granger Causality.*

## RINGKASAN

**Hubungan Kausalitas antara Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia Periode 1997-2014;** Retno Ayu Wulansari, 110810101097; 2015; 92 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya yang memadai dan beraneka ragam untuk diolah. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting untuk pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa pulau besar yang mempunyai karakteristik dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Wilayah Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada wilayah Indonesia yang lainnya. Hal ini membuat masalah yang dihadapi berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan ekonomi yang ada di suatu negara terutama Indonesia baik itu di daerah maupun keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya inflasi di Indonesia dampak berupa penurunan pertumbuhan ekonomi atau juga penurunan kesejahteraan penduduk akibat kenaikan harga barang umum secara terus menerus pada periode tertentu. Banyaknya tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dapat menjadi modal untuk pembangunan ekonominya. Akan tetapi pada kenyataannya kualitas tenaga kerja Indonesia yang masih rendah serta distribusinya yang tidak merata menjadi suatu permasalahan di Indonesia yang sensitif terhadap dampak dari adanya gejolak ekonomi yang berasal dari luar ataupun dalam Negara Indonesia itu sendiri. Masalah tenaga kerja tidak lepas dari pemberian upah dari pengusaha sebagai timbal balik jasa atas produktivitas yang diberikan oleh tenaga kerja. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga barang-barang pada beberapa tahun terakhir membuat kesejahteraan tenaga kerja semakin menurun. Oleh karena itu, tenaga kerja menuntut kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa dan Inflasi di Indonesia. Penelitian ini mengambil objek Negara Indonesia dengan rentang periode waktu dari tahun 1997-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu meliputi uji akar-akar unit (*unit root test*), uji kointegrasi dan uji kausalitas granger untuk mengetahui hubungan kausalitas antara kedua variabel. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah pada Wilayah Jawa terdapat hubungan searah pada Lag 5 antara UMP dan inflasi di Indonesia. Sedangkan pada Wilayah Luar Jawa tidak terdapat hubungan kausalitas antara UMP dan inflasi di Indonesia.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1997-2014**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam hal motivasi, pengalaman, nasihat, kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainuri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Dr. Regina Niken W., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik serta pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ibu Ciplis Gema Qori'ah, SE., M.Sc serta Bapak Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D, terima kasih atas ilmu dan segala hal yang telah diberikan baik berupa motivasi, nasihat-nasihat, kritik dan saran, serta dukungan moral yang begitu berharga bagi penulis dalam hal pendidikan akademis maupun pengetahuan diluar akademis yang membangun;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Pusat;

6. Ibunda Sunarti dan Ayahanda Gatut Sutiyaatmoko yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan baik secara moral dan materi yang tidak terhingga kepada penulis;
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa serta semangat yang selalu dicurahkan selama ini;
8. Kakakku Sigit Prasetyo, Galuh Yunita Ardi Ningsih, dan Kakak Iparku Desi Ulandari, Adikku Dimas Agung Pamungkas, keponakanku Meylina Purwa Ningsih dan Azkira Jazilah Aura Prasetyo, terima kasih atas motivasi, doa, serta kasih sayangnya selama ini untuk penulis;
9. Vicky Sampurno yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Sahabat tercinta, Aldila, Karisa, Ajeng, Melinda, Dewi, Elani, Airin, Sucik, Farida, Dila, Christin, Cintya Ika, Yayang, Ria, Reni, Nurul, Rista, Ave, Fifi, Indah, Mela serta teman-teman Konsentrasi Moneter 2011 lainnya terima kasih atas pengalaman serta motivasi yang diberikan pada penulis dan bersedia menjadi tempat bercerita keluh kesah, serta kenangan yang tidak ternilai bagi penulis;
11. Kakak angkatan di Konsentrasi Moneter, serta adik pejuang baru Konsentrasi Moneter 2012 yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penulis;
12. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan;
13. Putra, Reza, Vika, Panji, Beni, dan seluruh keluarga besar Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) terima kasih atas pengalaman dan kekeluargaannya;
14. KKN Desa Sumberkalong Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Amelia, Lidya, Yuni, Anjar, Liza, Agung, Ade, Taufik, Agung, dan Rendy beserta seluruh perangkat desa dan warga setempat yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini;

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada suatu hal yang sempurna di dunia ini termasuk penulis, sehingga penulis menerima berbagai kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Jember, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Inflasi.....	8
2.1.2 Kurva Phillips .....	15
2.1.3 Konsep Upah .....	21

2.1.4 Upah Minimum.....	23
<b>2.2 Penelitian Sebelumnya.....</b>	<b>25</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>29</b>
<b>2.4 Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Spesifikasi Model Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 Metode Analisis Data.....</b>	<b>31</b>
3.3.1 Uji Stasioner ( <i>Unit Root Test</i> ) .....	31
3.3.2 Uji Derajat Integrasi.....	32
3.3.3 Uji Kointegrasi ( <i>Cointegration Test</i> ) .....	33
3.3.4 Uji Kausalitas Granger .....	34
<b>3.4 Definisi Variabel Operasional .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Gambaran Umum.....</b>	<b>38</b>
4.1.1 Dinamika Inflasi dan Upah di Indonesia .....	39
<b>4.2 Hasil Model Kausalitas Granger pada Inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia.....</b>	<b>53</b>
4.2.1 Hasil Uji Akar Unit .....	54
4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi.....	55
4.2.3 Hasil Uji Kausalitas Granger .....	57
<b>4.3 Pembahasan Analisis Hubungan Kausalitas Inflasi dan Upah Minimum Provinsi di Indonesia .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya .....	28
Tabel 4.1	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2000-2013 .....	43
Tabel 4.2	Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2000-2014 .....	45
Tabel 4.3	Tenaga Kerja di ASEAN 5.....	48
Tabel 4.4	Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji <i>Augmented Dickey-Fuller</i> .....	55
Tabel 4.5	Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode <i>Johansen Cointegration Test</i> pada Pulau Jawa .....	56
Tabel 4.6	Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode <i>Johansen Cointegration Test</i> pada Pulau Luar Jawa .....	56
Tabel 4.7	Hasil <i>Granger Causality Test</i> untuk variabel INF dan UMP Jawa .....	57
Tabel 4.8	Hasil <i>Granger Causality Test</i> untuk variabel INF dan UMP Luar Jawa .....	61

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar1.1	Pertumbuhan Upah Minimum Regional/Provinsi Indonesia .	4
Gambar 2.1	Kurva Phillips .....	15
Gambar 2.2	Kurva Phillips Jangka Pendek dan Jangka Panjang .....	16
Gambar 2.3	Kurva Tenaga Kerja dan Output Klasik .....	19
Gambar 2.4	Determinasi Klasik Penawaran Agreggate .....	20
Gambar 2.5	Kerangka Konseptual Penelitian .....	29
Gambar 4.1	Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1997-2014 .....	41
Gambar 4.6	Upah Minimum Provinsi (UMP) secara Riil di Jawa dan Luar Jawa .....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A.	Data Penelitian Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia .....	76
Lampiran B.	Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi antara Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia .....	78
Lampiran C.	Uji Kointegrasi ( <i>Johansen Cointegration Test</i> ) .....	86
Lampiran D.	Uji Kausalitas Granger ( <i>Granger Causality Test</i> ) .....	92

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu indikator yang mempunyai peran penting dan tidak dapat diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat (Rizki, 2012). Definisi lainnya, inflasi merupakan kecenderungan harga-harga umum untuk mengalami kenaikan dapat dilihat bahwa kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dikatakan sebagai inflasi terkecuali kenaikan harga itu menyebar dengan mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang yang lainnya (Maqrobi dan Pujiati, 2011).

Dampak yang dirasakan dengan terjadinya inflasi dalam perekonomian yaitu munculnya ketidakstabilan, menurunkan minat masyarakat untuk menabung maupun menginvestasikan hartanya, juga dapat menghambat peningkatan ekspor, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Inflasi Indonesia pernah mencapai titik puncak dimana terjadi suatu hyperinflasi pada perekonomian dengan laju inflasi mencapai 650 persen pada tahun 1960. Terjadinya hyperinflasi pada tahun 1960-an dengan berbagai pengaruh yang negatif menyebabkan pemerintah memberikan perhatian lebih pada pengendalian laju inflasi. Pemerintah menggunakan kebijakan makro ekonomi dalam menekan laju inflasi pada saat tersebut. Pada tahun 1980 dengan berjalannya kebijakan makro ekonomi dalam menekan laju inflasi mengalami keberhasilan dalam menekan laju inflasi di Indonesia. Dalam suatu perekonomian yang berkembang suatu inflasi dikatakan rendah atau disebut inflasi merayap jika inflasi mencapai 2 hingga 4 persen. Akan tetapi sering sekali inflasi yang lebih tinggi sekitar 5 hingga 10 persen akan berlaku. Pada saat terjadi

suatu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang sering disebut dengan hyperinflasi.

Dampak dari pertumbuhan inflasi pada suatu perekonomian oleh sebagian ahli disebutkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor penting untuk stimulator dari pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga secara umum tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah kerja, akan tetapi berpengaruh langsung terhadap keuntungan yang akan bertambah. Kenaikan keuntungan ini akan menyebabkan investasi di masa mendatang dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya jika inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi pengaruhnya terhadap perekonomian adalah tidak berkembangnya perekonomian seperti yang diharapkan dikarenakan mengalami ketidakstabilan sosial dan politik yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perkembangan (Sukirno, 2004)

Krisis ekonomi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan inflasi. Munculnya inflasi tahun 1997 di Indonesia menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi yang signifikan. Imbas dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 dirasakan pada tahun 1998 dimana inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 77,63 persen. Adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 disebabkan oleh dua hal yaitu krisis perbankan dan hutang swasta yang melambung tinggi. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan sejak pertengahan tahun 1980an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Tidak adanya hukuman bagi bank yang melanggar aturan dan terdapat bank yang tidak mencukupi modal dalam membangun cabang juga sebagai faktor yang menyebabkan suatu inflasi terjadi.

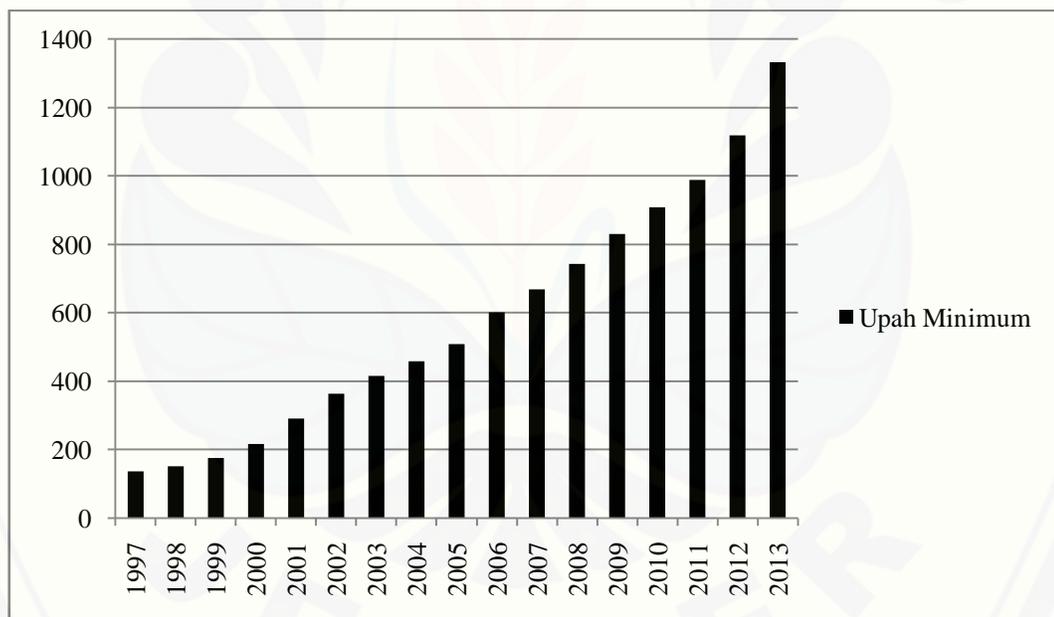
Kondisi perekonomian di Indonesia yang pada akhir tahun 2014 mengalami kenaikan inflasi diakibatkan oleh adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga-harga secara umum dirasakan oleh masyarakat dan juga para pegawai maupun tenaga kerja. Pada kenyataannya adanya inflasi membuat kebutuhan manusia yang selalu ingin dipenuhi tidak terjangkau oleh masyarakat golongan

menengah ke bawah terutama para tenaga kerja. Oleh sebab itu para pekerja selalu meminta upahnya dinaikkan lebih besar dari upah yang telah ditetapkan. Walaupun pemerintah selalu bertahap menaikkan upah minimum para pekerja tapi hal itu tidak sebanding dengan kebutuhan para pekerja yang tidak dapat terpenuhi karena adanya inflasi pada harga-harga. Banyak penelitian empiris yang telah meneliti hubungan inflasi dengan upah dan menjelaskan bagaimana hubungan dari upah dan inflasi saling berpengaruh atau tidak. Cacnio (2011) berpendapat bahwa hubungan kausalitas antara perubahan upah dan inflasi berjalan di dua arah yang berarti perubahan upah dan inflasi saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Zanetti (2005) berpendapat bahwa perubahan harga (inflasi) secara sistematis mempengaruhi upah akan tetapi perubahan upah berpengaruh terhadap perubahan harga (inflasi) jauh lebih sensitif dari pada pengaruh inflasi terhadap perubahan upah di suatu negara.

Indonesia yang memiliki banyak pulau di dalamnya dengan SDA dan SDM yang cukup besar akan menjadi modal awal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah Jawa merupakan pulau yang lebih kecil daripada Wilayah yang berada di Luarnya, akan tetapi Jawa merupakan pusat pertumbuhan yang berada di Indonesia yang memiliki 3 sektor unggulan yaitu industri, perdagangan, dan pertanian. Tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan yang berasal dari Luar Jawa lebih memilih untuk berpindah ke Jawa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan distribusi tenaga kerja tidak merata di semua wilayah. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda membuat perbedaan antara Wilayah Jawa dan Luar Jawa. Rendahnya tenaga kerja yang memiliki kualitas di Luar Jawa membuat SDA yang ada tidak terolah secara maksimal.

Angkatan kerja yang berada di Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengencarkan untuk menaikkan upah mereka karena himpitan ekonomi yang terus naik. Kenaikan upah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para angkatan kerja sebagai balas jasa atas produktivitasnya. Berbagai situasi seperti naiknya harga minyak membuat angkatan kerja terus bergejolak untuk menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi. Pemerintah sebagai sentral dari kebijakan mulai

menetapkan upah minimum sebagai batas minimal para pengusaha untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Upah secara tidak langsung berhubungan dengan perubahan inflasi yang pada kenyataannya jika terjadi inflasi atau kenaikan harga barang umum secara bertahap para angkatan kerja menuntut kenaikan upah yang merupakan salah satu biaya produksi suatu output. Sesuai dengan teori strukturalis dimana teori ini dikembangkan di negara berkembang menjelaskan bahwa ketidakpastian bahan makanan akan membuat biaya produksi mengalami kenaikan yang selanjutnya akan meningkatkan inflasi. Inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan upah juga dijelaskan pada teori dorongan biaya dimana kenaikan biaya produksi yang salah satunya adalah upah akan meningkatkan inflasi (kenaikan harga umum).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Upah Minimum Regional/Provinsi Indonesia (Sumber : BPS. 2014)

Upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, karena sifat dari pasar tenaga kerja di Indonesia dengan tingkat pekerjaan rentan dan informalitas yang tinggi serta kapasitas yang terbatas untuk

pengawasan tenaga kerja, maka tidak semua pekerja menerima upah minimum. Pada Agustus 2013, persentase pekerja yang memperoleh upah di bawah upah minimum provinsi diperkirakan 36,2 persen. Upah minimum Provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2007 yang berkisar Rp 135.000,00 hingga pada tahun 2013 Rp 1.332.400,00.

Mohammadi (2014) dengan menganalisis hubungan perkembangan harga dan upah dalam perekonomian Iran menyatakan bahwa antara inflasi dan harga memiliki hubungan dua arah. Dimana adanya pertumbuhan inflasi mempengaruhi perubahan upah, dan begitu juga adanya kenaikan harga akan menyebabkan inflasi di Iran. Berbanding terbalik dengan Aziz and Fares (2010) yang menyatakan bahwa perubahan upah sektor publik independen atau tidak mempengaruhi perubahan harga (inflasi) pada ekonomi Mesir. Upah di sektor publik merupakan fungsi harga masa lalu bukan pada tingkat inflasi yang diharapkan. Menurut Kumar, Webber, and Perry (2009) berkaitan dengan upah riil, inflasi dan keterkaitan produktivitas tenaga kerja pada ekonomi Australia selama periode 1965-2007 menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen upah riil di sektor manufaktur menyebabkan peningkatan produktivitas sektor antara 0,5 dan 0,8 persen. Sesuai dengan pengujian granger yang dilakukan menunjukkan bahwa upah riil dan inflasi memiliki hubungan terhadap produktivitas dalam jangka panjang.

Penetapan upah minimum pada setiap provinsi berbeda dengan provinsi yang lainnya. Upah minimum Pulau Jawa akan berbeda dengan Luar Jawa menyesuaikan Sumber Daya serta kesepakatan pengusaha dengan para tenaga kerja. Perkembangan upah minimum yang berada di Pulau Jawa dan Luar Jawa sama-sama mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kenaikan upah minimum di Pulau Jawa lebih besar daripada kenaikan upah minimum di Luar Jawa. Pada tahun 2012 sendiri kenaikan upah minimum di Pulau Jawa meningkat signifikan daripada Luar Jawa. Akan tetapi, pada tahun 2013 kondisi berbalik dimana kenaikan upah minimum di Luar Jawa lebih besar daripada kenaikan upah minimum di Pulau Jawa. Kenaikan upah minimum yang berada di Jawa dan Luar Jawa dapat disebabkan

oleh berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kenaikan harga, pemotongan subsidi harga minyak, dan lainnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tentang hubungan inflasi dan UMP. Dimana pada perekonomian Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang bisa dikatakan tinggi dengan sistem upah minimum dirasakan oleh para tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan tenaga kerja tersebut. Indonesia sendiri setiap provinsi memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masing provinsi, kondisi tenaga kerja yang berada di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa pun serta kebutuhan yang mereka inginkan. Para pengusaha pun menetapkan UMP di daerahnya berbeda seiring dengan produksi yang dikakukan. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana arah hubungan inflasi dan upah minimum provinsi yang ada di Indonesia dimana pada penelitian ini membahas tentang UMP Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa pada periode 1997-2014.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas serta rumusan masalah yang telah ditentukan, maka terdapat tujuan yang diharapkan dapat menjawab masalah dari penelitian ini untuk mengetahui arah hubungan dari inflasi dan UMP yang ada di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan di Luar Jawa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

masyarakat tentang bahasan yang diteliti dalam penelitian tersebut yang menitikberatkan pada hubungan kausalitas antara perubahan upah minimum provinsi serta inflasi yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi Negara Indonesia, dalam hal ini:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait yang ada hubungannya dengan upah minimum provinsi tenaga kerja dan inflasi di Indonesia.
2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama.
3. Sebagai sarana informasi serta pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai paradigma teoritis tentang hubungan antara perubahan upah dan inflasi harga di Indonesia. Selain itu, pada tinjauan pustaka ini ditulis untuk memperkuat penulisan yang akan disajikan baik ringkasan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang berisi ulasan dan hasil dari penelitiannya, serta terdapat kerangka konseptual yang menggambarkan alur penelitian penulisan. Bagian terakhir pada bab tinjauan pustaka ini menyajikan hipotesis dan asumsi penelitian.

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Soetriono, 2007). Definisi tentang inflasi yang merupakan kecenderungan harga-harga umum untuk mengalami kenaikan dapat dilihat bahwa kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dikatakan sebagai inflasi terkecuali kenaikan harga itu menyebar dengan mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang yang lainnya (Maqrobi dan Pujiati, 2011). Keynes sendiri berpendapat bahwa terjadinya inflasi dikarenakan masyarakat yang berkeinginan memenuhi kebutuhannya diluar kemampuan yang bisa mereka capai atau dapat dikatakan jika masyarakat ingin memiliki memenuhi kebutuhan diluar kemampuan ekonominya. Inflasi dapat juga diartikan sebagai tingkat kenaikan harga secara menyeluruh ketika kebanyakan harga naik secara serentak di beberapa tempat (Case and Fair, 2007). Proses dari inflasi dijelaskan sebagai perebutan bagian rezeki antara kelompok masyarakat yang ingin memperoleh bagian lebih besar daripada yang dapat

disediakan. Dimana proses ini menimbulkan suatu keadaan yang membuat permintaan masyarakat barang kebutuhannya lebih tinggi daripada penawaran atas barang yang disediakan, kondisi ini dapat dikatakan sebagai *inflationary gap* (Soetriono, 2007).

Menurut Boediono (dalam Soetriono, 2007) inflasi dibagi atas beberapa bagian berdasarkan atas parah atau tidaknya inflasi tersebut. Jenis inflasi berdasarkan parah tidaknya dikelompokkan sebagai berikut:

1. Inflasi ringan, dimana inflasi ini berada di bawah 10% per tahun
2. Inflasi sedang, inflasi ini berada antara 10% sampai 30% per tahun
3. Inflasi berat, inflasi ini berada antara 30% sampai 100% per tahun
4. Hyperinflasi, dimana inflasi ini merupakan inflasi yang terlampaui tinggi dimana berada di atas 100% pertahun.

Berdasarkan asal terjadinya inflasi dapat digolongkan atas inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*) (Dharmayanti, 2011). Inflasi yang terjadi di dalam negeri disebabkan karena kenaikan biaya-biaya yang ada di dalam negeri seperti halnya defisit anggaran belanja negara. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri disebabkan karena kenaikan harga-harga atau biaya yang berasal dari negara-negara yang menjadi mitra dagang negara tersebut. Dilihat dari penyebab terjadinya, inflasi dibedakan menjadi dua sebab diantaranya (Nasution, 1997):

1. Inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan masyarakat atas barang-barang kebutuhan (*demand inflation*). Berdasarkan teori inflasi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya inflasi terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap barang dibandingkan dengan barang yang disediakan oleh produsen. Terjadinya kelebihan permintaan ini yang mengakibatkan harga mengalami kenaikan atau akan terjadi inflasi (Nasution, 1997).
2. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi atas barang-barang kebutuhan (*cost inflation*). Inflasi ini dapat disebabkan karena kenaikan upah tenaga kerja, dimana kenaikan upah tenaga kerja ini akan mengakibatkan kenaikan

harga atas harga barang yang ditawarkan oleh produsen (Nasution, 1997). Inflasi yang disebabkan atas dorongan biaya produksi dapat dibedakan atas unsur penyebabnya diantaranya adalah *cost push inflation*, *price push inflation*, dan *import cost push inflation*.

Menurut Soediyono (dalam Soetriono, 2007) inflasi dibagi atas tiga sebab yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi permintaan (*Demand-pull inflation*) atau sering disebut dengan inflasi tarikan permintaan dan *demand inflation*.
2. Inflasi penawaran (*cost-push inflation*) atau *supply inflation*
3. Inflasi campuran dimana merupakan inflasi gabungan antara inflasi permintaan dan inflasi penawaran atau sering disebut dengan *mixed inflation*.

Pada inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan menurut kaum monetarist penyebab inflasi ini berasal dari kelebihan penawaran uang dibandingkan dengan yang diminta oleh masyarakat. Kaum neo-keyenesian pun tidak menyangkal pendapat yang dikemukakan oleh kaum monetarist hanya saja menambahkan pendapat bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta surplus transaksi berjalan (Susanti *et al*, 1995). *Demand-pull inflation theory* merupakan sebuah teori alternatif dari proses inflasi adalah bahwa hal itu disebabkan oleh permintaan agregat berlebih. Teori tersebut berpendapat bahwa kenaikan kebijakan moneter ekspansif permintaan agregat, menempatkan tekanan terhadap kenaikan harga, perusahaan cenderung untuk menyewa dan menarik lebih banyak tenaga kerja dengan menawarkan upah yang lebih tinggi, kecuali pasokan tenaga kerja yang cukup elastis maka upah akan mengalami kenaikan (Aziz and Fares, 2010). Kenaikan harga di sisi lain, akan menyebabkan buruh untuk menawar kenaikan upah yang lebih tinggi pada periode berikutnya (teori klasik). Dalam analisis tersebut, upah kehilangan peran mereka sebagai indikator awal untuk inflasi. Menurut pandangan ini, sebab-akibat berjalan dari inflasi pertumbuhan upah karena hasil peningkatan harga menyebabkan para pekerja untuk menuntut yang lebih tinggi

(Mehra, 2000). Kenaikan upah membuat masyarakat berpendapat bahwa dengan kenaikan upah ini maka akan terjadi kenaikan inflasi pada periode selanjutnya secara bertahap. Pandangan atas pemebntukan suatu harapan masyarakat disebut dengan harapan adaptif (*adaptive expectations*) yang menjelaskan bahwa perubahan harapan akan terjadi secara perlahan sepanjang waktu seiring dengan perubahan data masa lalu (Miskhin, 2008).

Sedangkan inflasi jika dilihat dari sisi penawaran menekankan bahwa inflasi terjadi karena kenaikan penawaran yang melebihi permintaan. Faktor yang yang mempengaruhi inflasi ini adalah kenaikan upah, harga bahan baku, serta kekakuan struktural (Susanti *et al*, 1995). *Cost-push inflation theory* menjelaskan jika biaya upah naik lebih cepat daripada produktivitas, tingkat harga akan naik karena perusahaan yang berkembang meningkatkan biaya upah dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi (Mohammadi, 2014). Oleh karena itu perubahan produktivitas disesuaikan upah dapat dikatakan sebagai indikator utama inflasi masa depan (Mehra, 2000). Pandangan bahwa perubahan sistematis pada upah dan harga yang berasal dari model *expectations-augmented Phillips curve* pada proses inflasi. Jika hal itu benar maka pergerakan jangka panjang antara harga dan biaya tenaga kerja dapat berkolerasi.

Sementara itu, ada keterbatasan teori *Cosh-Push Inflation* dimana upah merupakan faktor penting dalam menentukan harga karena hal tersebut mempengaruhi biaya marjinal perusahaan. Namun, yang harus dipertanyakan yaitu mengapa upah yang lebih tinggi tidak menyebabkan inflasi. Jika kebijakan moneter secara aktif mencoba untuk menstabilkan inflasi, pengaruh upah yang lebih tinggi mungkin dikurangi (Aziz and Fares, 2010). Jika negosiasi upah antara serikat pekerja dan perusahaan di berbagai sektor ekonomi tidak terkoordinasi, harga relatif produk berbagai sektor juga terpengaruh. Efek harga relatif akan cenderung meredam efek pada inflasi. Selanjutnya jika negosiasi upah yang terkoordinasi serikat buruh yang berbeda mungkin memiliki kekuatan pasar yang berbeda. Hal ini kemudian dapat menyebabkan kenaikan upah yang lebih tinggi di sektor dengan kekuatan pasar yang

relatif tinggi. Terlepas dari berbagai alasan selama upah kurang berkolerasi maka akan ada efek relatif pada harga (Jonsson and Palmqvist, dalam Mohammadi, 2014). Kemudian akan sulit untuk mengamati secara langsung pengaruh inflasi upah pada inflasi harga. Efek ini akan berbeda dari satu sektor ke sektor yang lainnya, meninggalkan efek akhir pada harga.

Terjadinya suatu inflasi dapat dilihat dari beberapa indikator yang berada di dalamnya seperti Indeks Biaya Hidup, Indeks Harga Konsumen, Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (GDP Deflator), serta Indeks Harga Perdagangan Besar (Susanti *et al*, 1995). Pada indikator-indikator tersebut dalam melihat suatu inflasi memiliki kekurangan dan kelebihan antar masing-masing indeks. Beberapa indikator dalam mengukur suatu inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Susanti *et al*, 1995):

#### 1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. IHK biasanya digunakan sebagai patokan dalam menilai inflasi (Rizki, 2012). Melalui perhitungan IHK dapat diketahui sumber inflasi secara umum yang terdiri dari perubahan indeks harga makanan, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa (Susanti *et al*, 1995).

#### 2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB merupakan indeks yang digunakan untuk menghitung perubahan harga pada tingkat perdagangan besar atau grosir dari komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Perhitungan IHPB sama dengan perhitungan IHK dimana IHPB dibagi juga dengan sektor-sektor ekonomi, ekspor-impor (Susanti *et al*, 1995).

#### 3. Deflator PDB

Deflator PDB merupakan indeks yang digunakan untuk menghitung tingkat perkembangan harga di tingkat produsen. Deflator PDB sejalan dengan persamaan

IHK dan menunjukkan perubahan dalam tingkat harga semua barang milik PDB (Rizki, 2012).

Menurut Boediono (dalam Soetriono, 2007) menyatakan bahwa terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang inflasi yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes, Teori Struktural. Pertama, teori kuantitas tentang inflasi menjelaskan bahwa peranan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga terhadap proses terjadinya inflasi. Pokok dalam teori ini adalah pertama, inflasi hanya dapat terjadi apabila ada penambahan volume jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang beredar tidak ditambah maka akan menyebabkan inflasi terhenti tanpa memperhitungkan asal dari inflasi itu sendiri. Kedua, laju inflasi ditentukan pada laju pertumbuhan jumlah uang beredar serta ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga di masa depan (Soetriono, 2007). Dalam teori kuantitas ini terdapat dua aliran di dalamnya yaitu Teori Kuantitas Tradisional dan Teori Kuantitas Modern (Zulfahmi, 2012). Dimana teori kuantitas tradisional pada dasarnya menganalisa tentang penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Kesimpulan teori ini adalah perubahan terhadap nilai uang atau tingkat harga diakibatkan oleh perubahan jumlah uang beredar dimana penambahan jumlah uang beredar akan menurunkan nilai uang. Dapat dikatakan bahwa penurunan nilai uang sama dengan kenaikan tingkat harga, dimana dengan kata lain jumlah uang beredar yang bertambah akan menyebabkan inflasi (Zulfahmi, 2012). Sedangkan teori kuantitas modern membahas tentang harapan masyarakat tentang kenaikan harga di masa depan. Teori ini menyebutkan bahwa masyarakat beramsumsi tentang ekspektasi mereka atas harga-harga barang di masa depan berdasarkan fenomena yang terjadi pada perekonomian serta informasi yang telah tersedia (Zulfahmi, 2012).

Kedua, Teori Keynes menjelaskan bahwa dalam inflasi terdapat *inflationary gap* di dalamnya. *Inflationary gap* timbul karena golongan masyarakat bisa merebut pendapatan nasional lebih besar yang diwujudkan dengan permintaan di pasar barang (Nasution, 1997). Dimana dengan kata lain golongan masyarakat berhasil memperoleh dana untuk merubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang

yang dapat didukung dengan dana yang mereka punya (Soetriono, 2007). Hal ini yang disoroti oleh Keynes tentang inflasi yang mana inflasi terjadi akibat dari keinginan masyarakat untuk hidup atau memenuhi kebutuhannya diluar kemampuan perekonomian yang tersedia. Keadaan daya beli golongan masyarakat yang tidak sama mengakibatkan realokasi barang-barang yang tersedia di masyarakat yang memiliki daya beli relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli relatif besar. Hal ini akan terjadi secara terus menerus sampai salah satu golongan masyarakat tidak memperoleh dana lagi untuk membiayai pembelian barang dengan harga yang telah ditentukan, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak melebihi penawaran barang yang menyebabkan inflasi akan terhenti atau dapat dikatakan *inflationary gap* nya menghilang (Atmadja, 1999).

Ketiga, teori strukturalis dikembangkan dari struktur perekonomian negara-negara berkembang khususnya pada Negara Amerika Latin. Inflasi dikaitkan dengan struktur perekonomian, dimana faktor ini hanya berubah secara bertahap dalam jangka panjang. Terdapat dua faktor yang menjadi masalah dalam menyebabkan inflasi di nagara berkembang adalah sebagai berikut (Nasution, 1997):

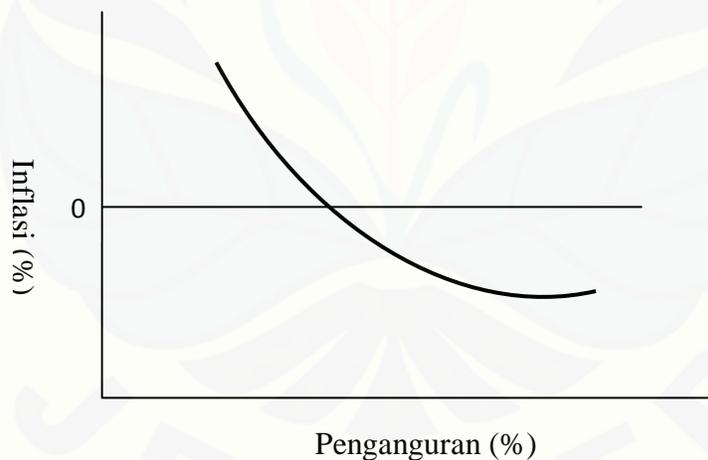
1. Ketidakelastisan penerimaan ekspor, dimana ekspor berkembang secara lambat dibandingkan sektor lain yang berada pada perekonomian. Penyebabnya adalah kenaikan harga-harga barang komoditi negara berkembang lambat dalam jangka panjang daripada harga barang industri.
2. Ketidakelastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan dalam negeri yang berakibat pada pertumbuhan produksi bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk serta pendapatan. Sehingga harga bahan makanan cenderung akan meningkat melebihi harga barang lainnya (Nasution, 1997). Kenaikan atas harga barang mengakibatkan tenaga kerja meminta kenaikan upah atas kerja yang telah dilakukan selama produksi, kenaikan upah ini akan diikuti oleh kenaikan harga produk, dan seterusnya (Soetriono, 2007).

Menurut kaum strukturalis selain harga komoditi pangan, faktor penyebab utama terjadinya inflasi adalah inflasi dari luar negeri (*imported inflation*). hal ini

disebabkan karena harga barang impor yang meningkat di daerah asal, dapat juga terjadi akibat adanya devaluasi atau depresiasi mata uang di negara pengimpor (Atmadja, 1999).

### 2.1.2 Kurva Phillips

Kurva Phillips diperkenalkan pertama kali oleh A. W. Phillips pada tahun 1958. Phillips menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan tingkat upah. Dalam konsepnya, Phillips menggunakan perubahan tingkat upah karena upah secara tidak langsung akan mempengaruhi barang dan jasa yang akan menimbulkan adanya inflasi. Sesuai perkembangannya kurva ini tidak digunakan oleh ekonom saat ini karena memiliki perbedaan pendapat tentang hubungan dalam kurva ini karena tingkat upah dapat digambarkan dari perubahan tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, dalam Rizki, 2012).

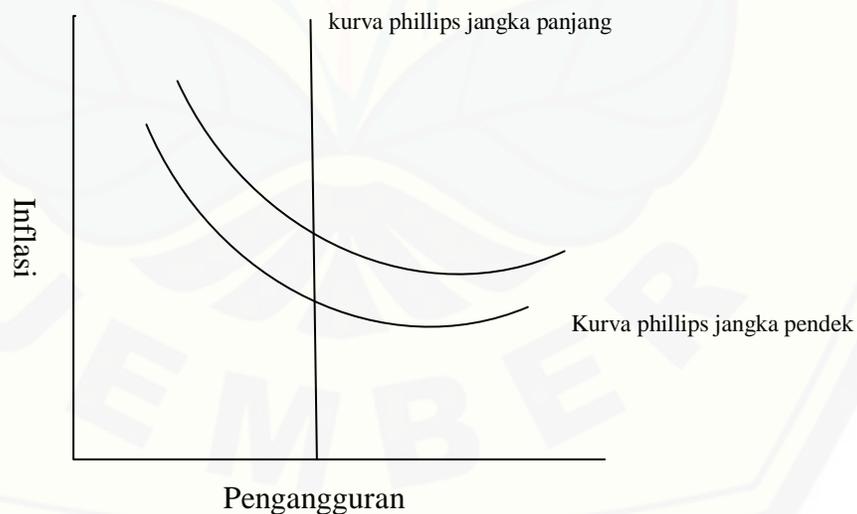


Gambar 2.1 Kurva Phillips (Sumber: Samuelson dan Nordhaus, dalam Rizki, 2012)

Kurva Phillips memiliki slope menurun yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat upah dengan pengangguran, dimana ketika tingkat upah naik maka tingkat pengangguran rendah. Kurva ini membuktikan adanya stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak pernah terjadi secara

bersamaan (Rizki, 2012). Ketika suatu perekonomian menginginkan kesempatan kerja yang tinggi atau rendahnya pengangguran maka mereka harus siap dengan tingkat inflasi yang tinggi. Dengan demikian kurva Phillips menunjukkan adanya *trade-off* antara inflasi dengan pengangguran.

Menurut modifikasi Phelps-Friedman tentang kurva Phillips menghasilkan kurva Phillips yang menunjukkan hubungan kurva miring ke bawah merupakan kondisi inflasi dan pengangguran jangka pendek. Jika tingkat inflasi naik, pengangguran turun, dan sebaliknya. Pada kurva Phillips jangka panjang digambarkan oleh Phelps-Friedman terdapat sumbu kurva berbentuk vertikal yang memotong sumbu horisontal pada tingkat pengangguran alamiah. Selama tingkat inflasi yang diantisipasi dengan benar maka pasar tenaga kerja akan jelas pada tingkat alamiah. Argumen Friedman, dalam bentuk yang paling sederhana menyatakan bahwa tingkat kenaikan upah akan ditentukan sebagian oleh tingkat yang diharapkan inflasi dan sebagian oleh tingkat aktual pengangguran. Pengaruh pengangguran pada kenaikan upah adalah negatif, akibatnya efek meningkatnya pengangguran akan menekan kenaikan upah (Cunningham, Tanpa Tahun).



Gambar 2.2 kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang (Sumber: Cunningham, Tanpa Tahun)

Dapat dilihat dari gambar 2.2 dimana tingkat inflasi harga tergantung pada tingkat pertumbuhan produktivitas, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi yang diharapkan. Setiap perubahan inflasi diperkirakan hanya menggeser kurva jangka pendek atas atau ke bawah, dengan jumlah yang sesuai ukuran perubahan dalam jangka waktu tertentu. Para monetaris memiliki teori upah nominal yang lekat dengan pengangguran. Tawar-menawar upah dilihat berdasarkan tingkat inflasi yang diharapkan. Dalam jangka panjang monetaris berpendapat bahwa kurva Phillip adalah vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Dua argumen yang melandasi penyimpangan dari kurva Phillip yaitu pertama, adalah bahwa kurva Phillips sebenarnya serangkaian beberapa kurva jangka pendek Phillips. Karena penyesuaian kurva jangka pendek baru tidak seketika, kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari tingkat alami (Cunningham, Tanpa Tahun).

Pada pasar tenaga kerja terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut asumsi klasik menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari upah riil. Berdasarkan hukum *The Law Minishing Return* produk marjinal dari tenaga kerja akan berkurang dengan penambahan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja hanya dapat bertambah apabila upah riil turun (Nasution, 1997). Sedangkan pada penawaran tenaga kerja juga tergantung pada upah riil. Dimana para tenaga kerja tidak akan sejahtera apabila upah dan harga sama-sama mengalami kenaikan yang sejajar. Jika pada kondisi seperti ini terdapat tenaga kerja yang merasa sejahtera maka kondisi tersebut dinamakan *money illusion*. Kondisi seperti ini tidak terdapat pada penawaran tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan hanya dapat berubah apabila ada perubahan upah riil (Nasution, 1997). Berikut persamaan permintaan dan penawaran tenaga kerja:

$$N_d = D\left(\frac{w}{p}\right) \quad (2.8)$$

$$N_s = S\left(\frac{w}{p}\right) \quad (2.9)$$

Keterangan:

$w$  : upah uang

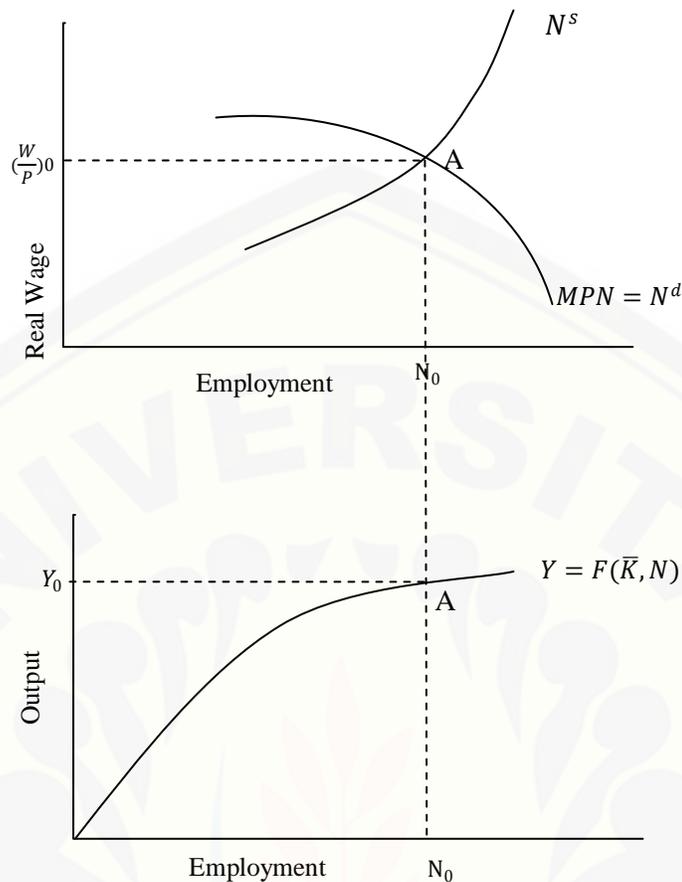
$p$  : tingkat harga

$\frac{w}{p}$  : upah riil

Hubungan sentral dalam model klasik adalah fungsi produksi agregat. Fungsi produksi, yang didasarkan pada teknologi perusahaan individual, hubungan antara tingkat output dan tingkat input faktor (Froyen, 2002). Untuk setiap tingkat input, fungsi produksi menunjukkan tingkat yang dihasilkan dari output dan dapat ditulis sebagai berikut:

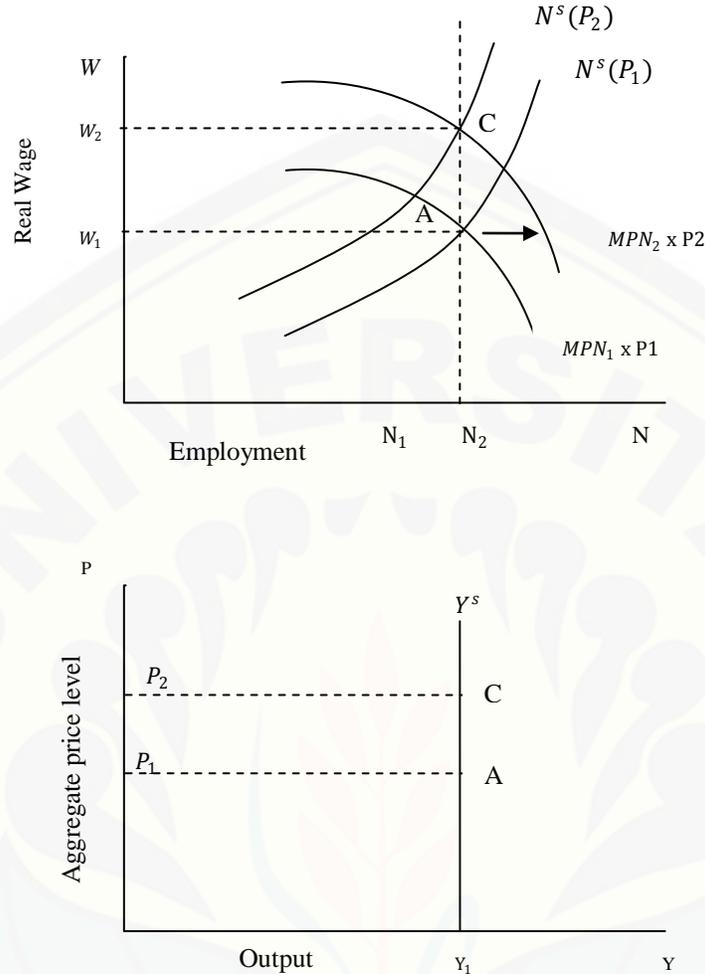
$$Y = F(\bar{K}, N) \quad (2.10)$$

Dimana  $Y$  adalah output riil,  $\bar{K}$  modal (tanaman dan peralatan), dan  $N$  adalah kuantitas input tenaga kerja yang homogen. Dalam jangka pendek modal diasumsikan tetap, yang diindikasikan dengan bar atas pada simbol modal ( $K$ ). Pada suatu negara teknologi dan populasi juga diasumsikan konstan lebih dari masa yang dipertimbangkan. Dalam waktu jangka pendek, output bervariasi semata-mata dengan variasi input tenaga kerja diambil dari populasi tetap (Froyen, 2002). Jangka pendek produksi digambarkan bahwa ada hubungan teknologi yang menentukan tingkat output mengingat tingkat input tenaga kerja. Persediaan modal, bersama dengan tingkat yang ada teknologi dan keterampilan tingkat tenaga kerja (homogen) dikatakan konstan. Ekonom klasik mengasumsikan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja (Froyen, 2002).



Gambar 2.3 kurva tenaga kerja dan output klasik (Sumber: Froyen, 2002)

Pada keseimbangan pasar tenaga kerja dan output pada teori klasik, gambar 2.3 a menggambarkan penentuan tingkat keseimbangan tenaga kerja ( $N_0$ ) dan upah riil  $(\frac{W}{P})_0$  pada titik potong antara permintaan agregat tenaga kerja dan kurva penawaran tenaga kerja. Keseimbangan input tenaga kerja ( $N_0$ ) menghasilkan keseimbangan output ( $Y_0$ ) yang dijelaskan dengan fungsi produksi seperti kurva 2.3 b. Pada kurva 2.3 b menunjukkan bahwa fungsi produksi digeser dengan perubahan teknis agar perubahan jumlah output akan diberikan tingkat input. Pergeseran fungsi produksi juga disebabkan karena perubahan modal dari waktu ke waktu. Model klasik menjelaskan bahwa semua variabel mempengaruhi sisi penawaran pasar terhadap output, banyak perusahaan yang memilih untuk memproduksi. Pada model klasik tingkat output dan tenaga kerja ditentukan oleh faktor penawaran (Froyen, 2002).



Gambar 2.4 Determinasi Klasik Penawaran Agregate (Sumber: Froyen, 2002)

Kurva vertikal penawaran agregat klasik pada gambar 2.4b menggambarkan bahwa nilai atas dari tingkat harga menghendaki tingkat atas yang proporsional dalam upah uang dari keseimbangan pasar tenaga kerja. Upah riil, tenaga kerja, dan yang lainnya, tingkat output sama pada  $P_1$  dan  $P_2$ . Kurva vertikal penawaran agregat menyiratkan bahwa output seutuhnya ditentukan oleh penawaran pada sistem klasik. Output ditentukan oleh hubungan antara pasar tenaga kerja dan fungsi produksi agregat (Froyen, 2002).

### 2.1.3 Konsep Upah

Upah dalam pengertian teori ekonomi dapat dikatakan bahwa suatu pembayaran kepada tenaga kerja atas jasa-jasanya dalam bekerja yang disediakan oleh para pengusaha serta jumlah keseluruhan pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja ditentukan oleh syarat atau masa tertentu (Sukirno, dalam Kistanto, 2013). Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Bab I pasal 1 nomor 30 menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang akan diterima tenaga kerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha yang telah disepakati menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Upah jika dikaitkan dengan pengangguran atau tenaga kerja sangat berhubungan erat dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja akan berpengaruh kepada tingkat upah yang akan diberikan oleh pengusaha.

Menurut pandangan klasik menjelaskan tingkat upah dimana pada suatu negara penggunaan tenaga kerja secara penuh akan tercapai karena mekanisme pasar tenaga kerja dimana akan mengurangi pengangguran bahkan dihapuskan (Tohar, 2000). Apabila terjadi pengangguran, maka pengangguran tersebut bersedia dibayar dengan upah yang lebih rendah sehingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Sedangkan menurut pandangan Keynes menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran kaum pekerja yang ahli dan bersertifikat serta kuatnya persatuan tersebut menjadikan pihak perusahaan tidak mudah menurunkan tingkat upah yang berlaku. Pandangan Keynes ini menjelaskan dimana tingkat upah turun menyebabkan pendapatan juga mengalami penurunan, penurunan pendapatan ini akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, selanjutnya menyebabkan kapasitas produksi tidak terserap secara maksimal yang akan membuat perusahaan merugi dan akan membuat PHK diberlakukan dan pengangguran akan cenderung meningkatkan (Tohar, 2000).

Menurut Ricardo dalam teorinya yang menjelaskan tentang upah alam menyebutkan bahwa upah menurut kodrat merupakan upah yang hanya cukup

memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya (Suparmoko, 2007). Pada pasar sendiri terjadi upah menurut harga pasar yang merupakan upah yang terjadi di pasar dengan melihat mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Teori upah yang lainnya adalah teori upah besi yang dikemukakan oleh David Ricardo dimana upah ini dipengaruhi oleh interaksi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Teori ini cenderung merugikan para pengusaha dan tenaga yang belum mendapat pekerjaan dimana kenaikan upah akan menurunkan permintaan akan tenaga kerja yang menyebabkan tenaga kerja yang menganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kenaikan biaya produksi (Lestyasari, Tanpa Tahun). Kenaikan biaya produksi ini secara tidak langsung berpengaruh pada kenaikan harga barang di pasar. Kondisi kenaikan harga barang disebabkan kenaikan biaya produksi ini menimbulkan inflasi. Tingkat upah dipengaruhi oleh tiga komponen diantaranya (Ananta, dalam Utomo, 2013):

1. Kebutuhan Fisik Minimum

Komponen ini didasarkan pada kebutuhan pokok tenaga kerja yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

2. Indeks Harga Konsumen

IHK merupakan patokan yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan hidup dimana perkembangan ini secara tidak langsung mencerminkan inflasi.

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam komponen pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan keadaan perekonomian di suatu daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perusahaan yang ada di daerah tersebut.

#### 2.1.4 Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Berdasarkan peraturan menteri menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas UMP atau UMK dan UMSP atau UMSK.

##### 1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten di satu provinsi di Indonesia. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan penetapan secara serentak pada tanggal 1 November di setiap provinsi di Indonesia.

##### 2. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

UMK merupakan upah minimum yang hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota.

##### 3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

UMSP merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi di Indonesia.

##### 4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)

UMSK merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum Bab II pasal 3 mengenai dasar dan wewenang penetapan upah minimum diantaranya:

1. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL.
3. Pencapaian KHL merupakan perbandingan upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.

4. Dalam pencapaian KHL, gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan yang lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.



## 2.2 Tinjauan Peneliti Sebelumnya

Penggunaan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini adalah sebagai bahan literatur yang digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan empiris dalam penelitian. Tinjauan dalam penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam pemaparan hasil analisis dari penelitian ini. Pada penelitian ini mengacu pada dua jurnal yaitu Mohammadi (2014) serta Azis dan Fares (2010). Mohammadi (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Does Minimum Wage Cause Inflation in Iran?” meneliti hubungan antara perubahan pada harga dan inflasi upah. Penelitian tersebut menggunakan objek di Negara Iran dengan periode waktu 1949-2013. Variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tingkat inflasi dan upah minimum. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kausalitas upah minimum dan inflasi berjalan di dua arah yang berarti bahwa ada hubungan saling mempengaruhi diantara kedua variabel. Sedangkan pada penelitian Azis dan Fares (2010) dengan penelitian yang berjudul “A Granger Causality Test between Wage Inflation and Price Inflation: A Case Study on the Egyptian Economy” yang meneliti hubungan antara inflasi harga dan inflasi upah. Penelitian tersebut menggunakan objek Negara Mesir dengan periode waktu 1990-2005 dan menggunakan variabel CPI dan Upah (W). Data yang digunakan dalam penelitian adalah CPI perkotaan, WPI (*Wage Price Indeks*), upah rata-rata sektor swasta dan publik, indeks harga pakaian dan alas kaki, indeks harga hotel dan restaurant, upah sektor manufaktur swasta dan publik, upah sektor hotel dan restaurant publik dan pribadi/swasta. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah perubahan upah pada sektor publik independen terhadap perubahan harga. Selain itu menunjukkan bahwa upah pada sektor publik merupakan fungsi perubahan masa lalu dari harga tetapi tidak pada tingkat inflasi masa depan/yang diharapkan. Inflasi disebabkan oleh faktor-faktor lain dari upah diantaranya: guncangan pasokan seperti pemotongan subsidi minyak, atau kebijakan ekspansif moneter dan fiskal, atau inflasi dari impor.

Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung lainnya adalah penelitian Palley (1999) yang menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan upah nominal bervariasi mengikuti siklus bisnis pada negara tersebut. Sebelum krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 inflasi harga dan inflasi upah nominal tidak saling memiliki hubungan. Pada tahun 1970an perubahan upah menyebabkan inflasi harga. Sedangkan pada tahun 1980an terdapat hubungan dimana inflasi harga menyebabkan perubahan upah nominal. Tahun 1990an pola hubungan antara kedua variabel ini berubah menjadi memiliki hubungan dua arah. Upah terus memiliki pengaruh pada inflasi berdasarkan IHK yang secara luas dipandang sebagai salah satu variabel pada target Fed. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zanetti (2005) dimana penelitiannya membahas hubungan antara upah dan inflasi IHK dalam mengidentifikasi efek timbal balik dari kedua variabel tersebut dan menilai relevansi upah sebagai indikator perubahan harga dalam jangka pendek. Hasil yang diperoleh adalah menjelaskan bahwa secara sistematis harga mempengaruhi upah dimana pengaruh upah terhadap perubahan harga lebih sensitif sesuai dengan sampel waktu yang diteliti.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, Mohammadi (2014) serta Azis dan Fares (2010) terletak pada pemilihan objek penelitian dan rentang waktu yang digunakan sebagai sampel penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk penentuan variabel dan alat analisis tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan variabel Upah ( $W$ ) dan tingkat inflasi ( $INF$ ). Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada negara Indonesia dengan mengelompokkan daerah penelitian yaitu Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian masing-masing pada Iran dan Mesir. Berikutnya adalah pada penelitian ini menggunakan rentang waktu dari 1997-2014 dengan data yang dipakai adalah data tahunan, sedangkan pada penelitian sebelumnya, Mohammadi (2014) menggunakan rentang waktu dari tahun

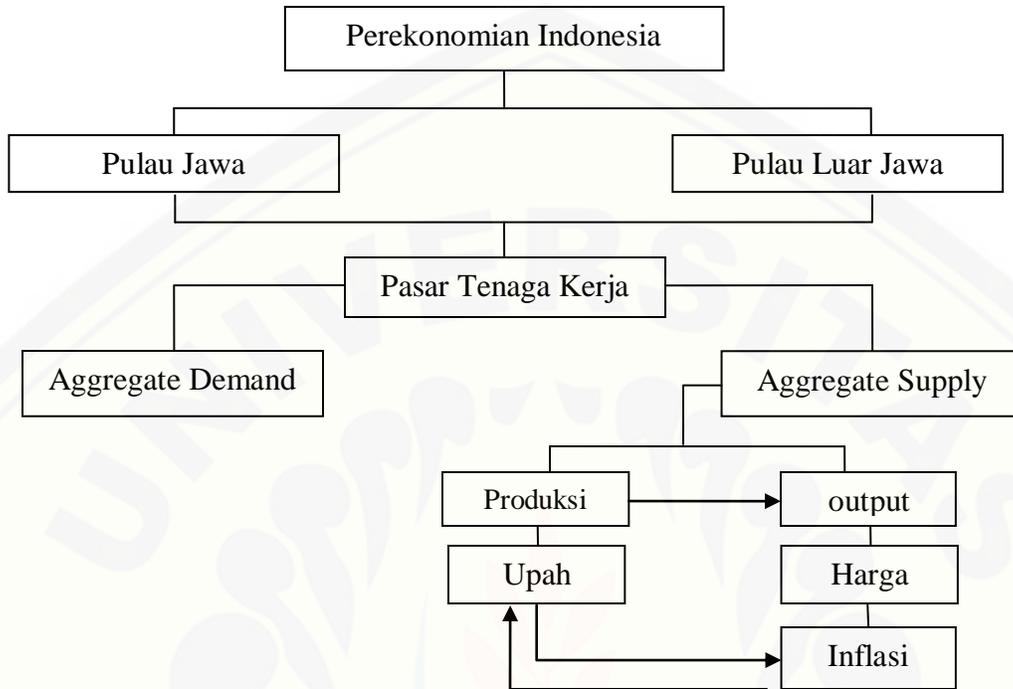
1949-2013 serta Azis and Fares (2010) menggunakan rentang waktu dalam penelitian dari tahun 1990-2005.



Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

<b>Nama Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Palley (1999)	The U.S. Inflation Process: Does Nominal Wage Inflation cause Price Inflation, Vica-versa, or Neither?	WAGEINF, CPIINF, CPIXINF, PPIINF	Granger causality analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah memiliki dampak terhadap inflasi IHK,
Zanetti (2005)	Do Wages Lead Inflation? Swiss Evidence	Wages, Inflation	Uji kausalitas granger	Ditemukan hasil bahwa harga secara sistematis mempengaruhi upah, sedangkan pengaruh upah terhadap harga jauh lebih sensitif terhadap pilihan periode sampel.
Aziz & Fares (2010)	A Granger Causality Test Between Wage-Inflation And Price Inflation: A Case Study On The Egyptian Economy	Inflation, Wages	Granger Causality Test	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan upah sektor publik tidak mempengaruhi perubahan harga.
Maqrobi & Pujiati (2011)	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Uji Kausalitas <i>Inflation and Economic Growth: Testing for Causality</i>	Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi	Pengujian granger causality	Menurut hasil uji kausalitas granger variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan kausalitas dua arah.
Rizki (2012)	Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran (studi Kasus Kota Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2006-2010)	Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran	Uji derajat intregasi, uji kointegrasi, , uji granger causality	Diketahui bahwa terjadi hubungan searah antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi indeks, sedangkan indeks inflasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk tingkat pengangguran dan tingkat inflasi ditemukan hubungan dua arah antara pengangguran dan inflasi yang saling berpengaruh.
Ozra Mohammadi (2014)	Does Minimum Wage Cause Inflation in Iran?	Wage inflation, price inflation	Granger Causality Test	Uji kausalitas granger membuktikan bahwa terdapat hubungan dua arah antara inflasi dan upah.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan landasan empiris yang telah terkonsep pada penelitian ini tentang hubungan kausalitas antara Upah Minimum Provinsi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Luar Jawa dan inflasi harga, maka hipotesis yang dibangun dari hal tersebut mengacu pada rumusan masalah yang akan dipecahkan yaitu bahwa adanya hubungan dua arah antara UMP Pulau Jawa dan Luar Jawa dan inflasi harga di Negara Indonesia.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan yang terkait dengan metodologi yang dapat menghasilkan suatu pernyataan atas masalah baik secara teoritis maupun empiris yang akan dipecahkan dengan adanya jenis dan sumber data yang diperoleh, spesifikasi model penelitian yang diestimasi, metode analisis data yang dapat mengestimasi hasil penelitian dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan.

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* dan data variabel yang digunakan merupakan data tahunan pada rentang periode tahun 1997-2014 dengan objek penelitian di Negara Indonesia dengan mengelompokkan Indonesia menjadi wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dan diolah dari situs Badan Pusat Statistik (BPS).

#### 3.2 Spesifikasi Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Granger menggunakan dua variabel data *time series* yang berhubungan dengan variabel yang memisahkan X dan Y diformulasikan dalam bentuk regresi. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Handoko (2014) dengan model sebagai berikut:

$$X_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.1)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r \lambda_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s \delta_j X_{t-j} + u_{2t} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana  $X_t$  dan  $Y_t$  merupakan variabel  $X$  dan  $Y$  yang diteliti. Sedangkan  $u_{1t}$  dan  $u_{2t}$  merupakan *error term* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan *time lag*  $m=n=r=s$ .

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Uji Stasioner (*Unit Root Test*)

*Unit Root Test* dapat disebut dengan *stationary stochastic process* dimana merupakan uji yang dilakukan untuk mengamati suatu koefisien tertentu dari model otoregresif yang diperkirakan memiliki nilai satu atau tidak (BAPEPAM-LK, 2008). Pengujian akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtun waktu perlu dilakukan untuk memenuhi keabsahan analisis uji kointegrasi. Pengujian ini ditujukan untuk melihat kestasioneran data yang akan di analisis (Rizki, 2012). Data yang dipergunakan dalam estimasi model harus bersifat stasioner, dimana data tersebut memiliki *varians* yang tidak terlalu dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya (Wardhono, 2004). Uji stasioner ini dilakukan dengan menggunakan uji akar unit melalui *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* dan *Dickey-Fuller test*. Kedua uji ini memiliki asumsi yang berbeda, uji DF menjelaskan bahwa kesalahan pengganggu terdistribusi secara indenpenden dan identik sedangkan uji ADF menyatakan bahwa pengembangan dari uji DF yang bertujuan untuk mengatasi adanya kemungkinan kesalahan penngganggu. Formulasi uji ADF yaitu (Gujarati, 2004):

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

Y = Variabel yang diamati

$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$

$\Delta Y_{t-i} = Y_{t-1} - Y_{t-2}$

t = trend waktu

Menurut formulasi uji ADF di atas maka bentuk penurunannya dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta INF_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta INF_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta INF_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.4)$$

$$\Delta W_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta W_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta W_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.5)$$

Untuk mengetahui kriterianya kemudian dibandingkan nilai statistik ADF  $\delta INF_{t-i}$  atau  $\delta W_{t-i}$  dengan nilai ADF tabel (*critical value*). Jika nilai statistik ADF  $\geq$  nilai ADF tabel maka hal itu berarti data tersebut stasioner dan berlaku sebaliknya jika nilai statistik ADF  $\leq$  nilai ADF tabel berarti data tersebut tidak stasioner (Wardhono, 2004).

### 3.3.2 Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi dilakukan untuk mengetahui pada derajat berapa data suatu data dalam penelitian bersifat stasioner (Wardhono, 2004). Uji ini dilakukan jika diketahui data tidak stasioner pada waktu dilakukan uji stasioner. Maksud dari uji derajat integrasi adalah untuk mengetahui derajat berapa data akan stasioner. Secara umum data yang tidak stasioner memerlukan diferensiasi sampai ke-*d* hingga data tersebut dikatakan stasioner. Dalam suatu uji derajat integrasi suatu data dalam

penelitian diperlukan pengujian lebih lanjut sampai ditemukan suatu kondisi stationer karena data X mungkin akan mengalami stasioner pada diferensi kedua, ketiga, dan seterusnya (Wardhono, 2004). Formulasi dari uji derajat integrasi adalah sebagai berikut:

$$\Delta 2Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta 2Y_{t-i} + 1 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana  $\Delta 2Y_t = \Delta Y_t - \Delta Y_{t-i}$ . Kemudian diformulasikan derajat integrasi dengan ADF pada variabel INF dan W sebagai berikut:

$$\Delta 2INF_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta \Delta INF_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta 2INF_{t-i} + 1 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.7)$$

$$\Delta 2W_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta \Delta W_{t-i} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta 2W_{t-i} + 1 + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.8)$$

Keterangan:

- INF = tingkat inflasi Indonesia
- W = UMP Wilayah Jawa dan Luar Jawa
- $\varepsilon_t$  = *error term*

### 3.3.3 Uji Kointegrasi (*Cointegration Test*)

Kointegrasi merupakan suatu kombinasi antara hubungan variabel yang tidak stasioner dan variabel tersebut diharuskan memiliki integrasi pada derajat yang sama (BAPEPAM-LK, 2008). Uji kointegrasi merupakan keberlanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Dalam melakukan uji kointegrasi harus terlebih dahulu mengetahui variabel yang diteliti mempunyai derajat integrasi yang sama atau tidak

(Wardhono, 2004). Apabila dalam suatu yang diteliti terdapat satu variabel atau lebih mempunyai derajat integrasi yang berbeda maka variabel tersebut tidak dapat berkointegrasi (BAPEPAM-LK, 2008). Uji kointegrasi ditujukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara Inflasi dan upah di Indonesia menggunakan metode Johansen test. Dalam metode tersebut harus melakukan dua uji statistik. Pertama, Uji Trace yaitu uji untuk menguji hipotesis nol yang mensyaratkan jumlah dari arah kointegrasi adalah  $\leq p$ . Formulasi uji tersebut sebagai berikut:

$$\lambda_{trace}(r) = -T \sum_{i=r+1}^p \ln(1 - \lambda_i) \dots \dots \dots (3.9)$$

Dimana  $\lambda_{r+1} \dots \dots \lambda_n$  yaitu nilai *eigenvectors* terkecil ( $p-r$ ). Hipotesis nol yang dipakai adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya  $r$  atau jumlah vector kointegrasi  $\leq r$ , dimana  $r=0, 1, 2$ , dan seterusnya. Kedua, uji maksimum *eigenvalen* dengan formulasi:

$$\lambda_{maks}(r, r + 1) = -T \ln(\lambda_{r+1}) \dots \dots \dots (3.10)$$

Didasarkan dengan hipotesis nol bahwa terdapat  $r$  dari vector kointegrasi yang berlawanan ( $r+1$ ) dengan vector kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut dapat dilihat melalui besarnya nilai Trace statistik dan Max-Eigen statistik dengan nilai kritikal pada  $\alpha = 5\%$ .

### 3.3.4 Uji Kausalitas Granger

Penelitian ini menggunakan alat analisis Uji Kausalitas Granger. Keterbatasan dalam analisis regresi merupakan ketidakmampuan mengungkapkan ada tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti secara lebih baik meskipun regresi dapat

mengukur tingkat hubungan statistik antara variabel (Wardhono, 2004). Uji Kausalitas Granger merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dapat dilihat sebagai variabel bebas (Eksogen) yang bermula dari ketidakpahaman hubungan saling mempengaruhi antar variabel (BAPEPAM-LK, 2008). Granger (1969) melihat keterbatasan ini dan kemudian mencoba untuk mendefinisikan hubungan antar variabel X dan Y dalam bentuk analisis kausalitas. Hasil analisis dari uji Kausalitas Granger ini melihat pertanyaan yang muncul apakah variabel X menyebabkan Y, ataukah sebaliknya yang mana jika variabel X menyebabkan Y artinya berapa banyak nilai X pada periode sekarang dapat dijelaskan oleh nilai X pada periode sebelumnya dan nilai Y pada periode sebelumnya (BAPEPAM-LK, 2008). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Inflasi yang dilihat melalui indikator IHK, dan UMP dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel tersebut. Menurut model dasar Granger yang telah disebutkan di atas maka diturunkan dalam estimasi model sebagai berikut :

$$INF_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i INF_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j W_{t-j} + u_{1t} \dots \dots \dots (3.11)$$

$$W_t = \sum_{i=1}^r \lambda_i W_{t-i} + \sum_{j=1}^s \delta_j INF_{t-j} + u_{2t} \dots \dots \dots (3.12)$$

Keterangan :

- INF = Tingkat Inflasi
- W = *Wages* (Upah) yaitu UMP
- $\alpha_i$  = koefisien regresi dari (INF) pada INF
- $\beta_j$  = koefisien regresi dari (W) pada INF
- $\lambda_i$  = koefisien regresi dari (W) pada W

$\delta_j$  = koefisien regresi dari INF pada W

m,n,r,s = *time lag*

### 3.4 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi variabel operasional merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel yang diteliti, antara lain:

1. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Indikator yang digunakan untuk mewakili inflasi yaitu IHK atau sering dikenal dengan CPI (*Consumer Price Index*). Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia pada rentang periode 1997-2014 dengan satuan persen (%).
2. Upah atau *Wages* merupakan harga atas jasa yang telah diberikan kepada orang lain. Dimaksudkan para pemberi kerja memberi imbalan kepada penerima kerja atas sumbangan jasa yang diberikan. Pada penelitian ini upah yang digunakan sebagai data penelitian adalah UMP yang berada di Indonesia dengan mengambil rata-rata UMP di Pulau Jawa dan Luar Jawa sebagai datanya, data upah diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 1997-2014 dengan satuan Rupiah. UMP yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan upah secara riil pada wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa. Perhitungan upah minimum provinsi secara riil dirumuskan sebagai berikut (Froyen, 2002):

$$\text{Real Wage} = \frac{w}{p} \quad (3.12)$$

Keterangan:

w : upah nominal

p : indeks harga

UMP secara riil ini menggunakan indeks harga (IHK) dengan menyetarakan tahun dasar dalam perhitungan IHK baru yang akan digunakan dalam perhitungan. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan IHK baru adalah tahun 2000 dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun dimana merupakan pemulihan dari adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan sebesar 5%.



## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai perkembangan inflasi serta UMP di Indonesia periode 1997-2014. Upah Minimum Provinsi dalam uraian serta hasil analisis ini dibagi atas wilayah Pulau Jawa dan wilayah Pulau Luar Jawa. Uraian yang terdapat dalam bab ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif yang berupa model statis dengan menggunakan metode Kausalitas Granger yang melihat hubungan antara UMP dan Inflasi di Negara Indonesia.

### **4.1 Gambaran Umum**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat dikatakan mempunyai Sumber Daya yang cukup melimpah seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia yang sangat melimpah di Indonesia seiring dengan penambahan penduduk yang cepat bisa menjadi hal positif dan hal negatif bagi Negara Indonesia. Banyaknya angkatan kerja yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja yang ada akan menjadi masalah yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan di seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini sangat menjadi pertimbangan pemerintah, apalagi dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dimana negara lain bisa dengan bebas masuk ke Indonesia seperti Tenaga Kerja ataupun ekspornya.

Keterbukaan ekonomi terhadap negara lain ditakutkan akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia sendiri. Menurut negara lain Indonesia sangat potensial untuk berinvestasi karena masyarakat Indonesia mayoritas bersifat konsumtif, hal ini akan menguntungkan negara lain. Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sendiri kualitasnya masih dibawah rata-rata dibandingkan negara lain. Pemerintah harus

memiliki strategi untuk lebih meningkatkan kualitas Tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan Tenaga Kerja negara lain.

Indonesia memiliki 33 provinsi dimana pada masing-masing provinsi memiliki ciri khas tersendiri. Kegiatan perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa, hal ini membuat kebijakan serta perlakuan pemerintah terhadap Pulau Jawa dengan Luar Jawa dapat dikatakan berbeda meskipun tujuan kebijakan tersebut bertujuan mensejahterakan masyarakatnya. Tenaga kerja yang berada di Jawa dan di Luar Jawa juga berbeda pandangan dalam mengambil pekerjaan. Kondisi perekonomian yang berfluktuasi di Indonesia seperti inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar akan berpengaruh terhadap tenaga kerja seperti tuntutan kenaikan upah ataupun yang lain.

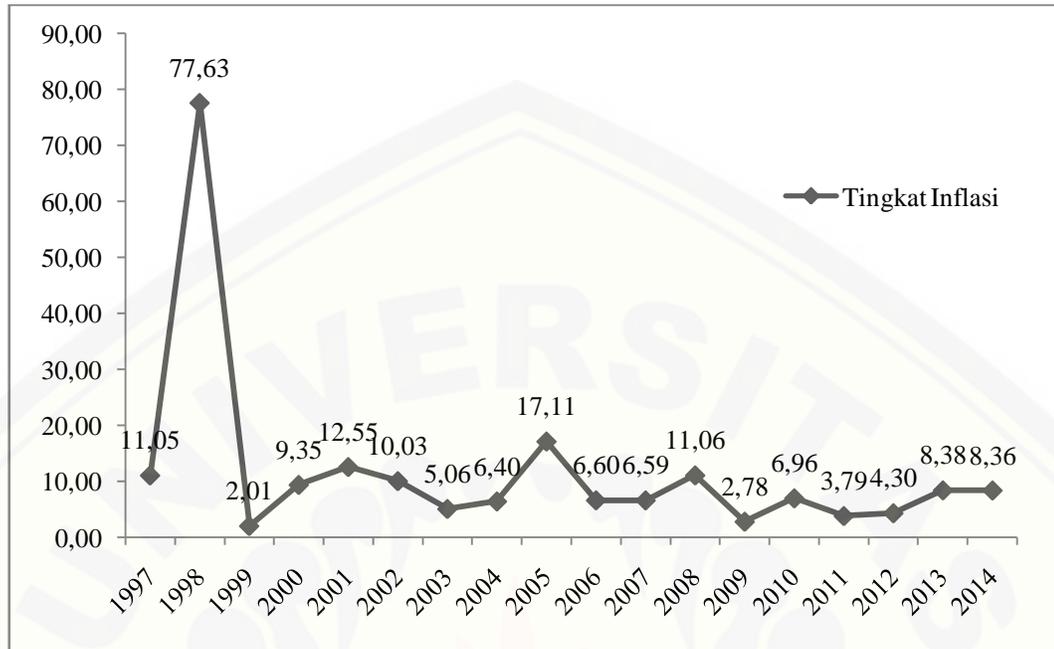
#### 4.1.1 Dinamika Inflasi dan Upah di Indonesia

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus (Soetriono, 2007:117). Indonesia merupakan negara dimana perekonomian tidak terlepas dari fluktuasi inflasi pada kegiatan ekonominya. Permasalahan makro yang terjadi di Indonesia yang belum bisa di ditangani yaitu masalah inflasi dan pengangguran. Penyebab dari adanya inflasi dapat disebabkan oleh kelebihan permintaan dan adanya dorongan biaya. Dampak yang disebabkan oleh adanya inflasi dirasakan pada beberapa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, ekspor dan impor, serta permintaan dan penawaran jumlah uang beredar. Inflasi tidak hanya menimbulkan dampak yang negatif saja, ketika tingkat inflasi kurang dari 10% adanya inflasi dapat menumbuhkan semangat persaingan sehingga kondisi kegiatan ekonomi mulai bergairah dengan persaingan para produsen yang memproduksi barang.

Indonesia sendiri pernah mengalami penurunan kegiatan ekonomi yang membuat banyak para pengusaha gulung tikar dengan tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 75%. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang

dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia berawal dari adanya krisis Asia tahun 1997/1998 di Negara Thailand dengan melemahnya nilai tukar mata uang Baht terhadap Dollar AS. Kondisi ini mulai menyebar ke negara-negara lain yaitu Malaysia, Korea, dan salah satunya Indonesia. Indonesia yang awalnya tidak akan terkena dampak dari adanya krisis di Negara Thailand dikarenakan fundamental yang kuat ternyata terkena dampak dari adanya krisis Asia ini. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada awal Juli 1997 dimana nilai tukar mata uang Rupiah melemah terhadap Dollar AS telah menjalar menjadi suatu krisis ekonomi di Indonesia. Dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang melemah membuat harga-harga barang mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran yang secara langsung meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997/1998 ini sangat berdampak pada peningkatan inflasi yang melonjak drastis pada tahun 1998 sebesar 77,63% dari tahun sebelumnya 1997 sebesar 11,05%. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi yaitu kondisi ketidakseimbangan kondisi neraca yang menurunkan kinerja perbankan serta aktivitas usaha. Ketidakseimbangan antara neraca sektor moneter dengan sektor fiskal menimbulkan masalah secara makro dimana disebabkan oleh adanya sumberdana dan alokasi dana yang tidak seimbang. Penyebab lain terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian berjalan lambat. Pertumbuhan Indonesia juga terhalang dengan gejolak sosial, politik, dan keamanan yang memunculkan resiko dalam dunia usaha dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan investasi menurun, kapasitas produksi dan tenaga kerja menurun pula yang mengakibatkan barang yang diproduksi oleh pengusaha dalam negeri semakin menurun dan berdampak terhadap ekspor yang semakin menurun.



Gambar 4.1 Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1997-2014 (Sumber: BPS, 2014, data diolah)

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang ada di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Setelah krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia tahun 1997/1998 dengan tingkat inflasi yang mencapai 75% pada tahun 1999 Indonesia melakukan pemulihan dari krisis yang membuat inflasi turun menjadi 2,01%. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, karena inflasi sendiri lebih mudah terkena dampak dari gonjangan yang ada dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Inflasi mulai dari tahun 1997-2014 menunjukkan fluktuasi yang beragam sesuai keadaan ekonomi yang terjadi pada tahun bersangkutan. Dampak dari terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia mulai melakukan proses pemulihan dimana pada tahun 2000 keadaan Indonesia cukup terkendali yang dilihat dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5% meskipun tingkat inflasi pada saat itu mencapai 9,35%. Pada tahun ini juga kondisi politik tengah ramai dikarenakan adanya pemilu untuk memilih presiden Indonesia setelah Soeharto turun dari jabatannya. Kondisi politik ini juga mempengaruhi tingginya inflasi tahun 2000.

Pada tahun 2005 terjadi peningkatan tingkat inflasi dari tahun sebelumnya sebesar 17,11%. Hal ini dikarenakan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak di Indonesia yang membuat harga-harga umum terutama makanan mengalami kenaikan. Selain itu juga terjadi depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia mengalami keterpurukan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan yang tinggi dengan kenaikan harga BBM, juga karena lemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar berdampak pada barang-barang ekspor. Kenaikan harga BBM secara langsung memberi dampak terhadap kenaikan harga atau inflasi, selain faktor lain yang berpengaruh. Adanya guncangan dari dunia global pada tahun 2008 juga berdampak pada naiknya inflasi sebesar 11,06%, hal ini dikarenakan adanya perubahan harga komoditi yang berada di luar negeri. Akhir tahun 2008 sendiri inflasi mengalami penurunan karena harga komoditi turun dan harga BBM mengalami penurunan. Begitu pula pada tahun 2014 tingkat inflasi sebesar 8,36% lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,38%, hal ini merupakan dampak dari adanya perubahan harga BBM. Indonesia merupakan negara yang mudah terkena dampak dari adanya gonjangan dari luar khususnya negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia.

Pengendalian inflasi sangat diperlukan untuk meminimalisasi tingkat inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi pada semua negara pada umumnya, akan tetapi inflasi yang ada di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kebijakan moneter (Atmadja, 1999). Pemerintah lebih sering menggunakan pendekatan moneter dalam mengantisipasi atau bahkan meredam tingkat inflasi yang di Indonesia. Dalam proses pengendalian inflasi perlu diperhatikan masalah dalam perekonomian pada negara tersebut agar pengendalian inflasi dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi tingkat inflasi yang berfluktuasi.

Dalam suatu perekonomian, inflasi merupakan salah satu indikator dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan inflasi memiliki dampak yang luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat (Rizki, 2012).

Salah satu dampak dari adanya inflasi terhadap perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. sebaliknya jika inflasi rendah maka akan berdampak pada terdorongnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu tumbuhnya inflasi melalui kenaikan pada permintaan agregat (Rizki, 2012). Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami pasang surut di dalamnya yang disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam melihat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan beberapa indikator dimana salah satunya adalah PDB (Produk Domestik Bruto).

PDB (Produk Domestik Bruto) pada suatu negara dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu negara atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi (BPS, 2014). PDB sebagai indikator makro penting dalam perekonomian Indonesia berperan penting untuk menilai suatu permasalahan makro ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Apabila pertumbuhan ekonomi dilihat dari setiap daerah, maka pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dengan melihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada setiap daerah. Indonesia tahun 2000 hingga 2013 dilihat dari PDRB nya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jika dilihat dari Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa pertumbuhan PDRB di Wilayah Luar Jawa pertumbuhannya lebih rendah daripada PDRB yang ada di Wilayah Jawa.

Tabel 4.1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2000-2013 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB		
	Jawa	Luar Jawa	Total
2000	134691,77	22259,50	1374048,62
2001	154562,46	25090,23	1564471,65
2002	175044,40	26681,28	1750017,54
2003	196744,04	30028,24	1964592,69
2004	220709,15	34512,59	2225418,05
2005	264181,60	40796,00	2686581,71
2006	311750,86	46950,40	3138165,94

2007	349640,16	54018,25	3556333,63
2008	412803,72	66452,68	4271044,59
2009	454375,45	71380,98	4653539,25
2010	512364,90	82254,97	5295073,58
2011	578700,19	94688,93	6028802,27
2012	646894,66	105621,93	6733160,11
2013	732402,98	117914,85	7578118,87
2000	134691,77	22259,50	1374048,62

Sumber: BPS, 2014, data diolah

Indonesia merupakan negara yang disebut oleh negara lain adalah negara kepulauan karena terdapat banyak kepulauan baik yang berpenghuni maupun tidak. Negara ini terdapat 5 pulau besar yang ada di dalamnya yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia memiliki karakteristik serta kekayaan alam yang berbeda pada masing-masing pulau. Pulau Jawa sendiri merupakan pulau yang luasnya paling kecil dari pulau besar lainnya yang ada di Indonesia, akan tetapi penduduk yang ada di Pulau Jawa lebih dari 50% daripada penduduk yang berada di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena ibukota Negara Indonesia sendiri berada pada salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa yaitu Jakarta serta kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia mayoritas dipusatkan pada Wilayah Jawa. Secara geografis wilayah yang ada di Indonesia memiliki ciri masing-masing seperti yang terjadi pada Wilayah Jawa dengan kondisi tanah yang subur sedangkan beberapa wilayah di Luar Jawa tidak sama dengan wilayah Jawa. berbagai hal yang membuat Wilayah Jawa lebih unggul daripada wilayah Luar Jawa selain dari segi geografis serta kegiatan ekonomi yaitu kecepatan mengakses informasi serta perkembangan teknologi cepat di Wilayah Jawa sebagai pusat dari Indonesia.

Kegiatan ekonomi pada suatu negara sangat beraneka ragam sesuai dengan potensi yang ada di negara tersebut. Pada suatu negara pasti memiliki kegiatan ekonomi yang dominan di negaranya. Indonesia memiliki beberapa usaha dalam kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang baik. PDB menurut lapangan usaha merupakan PDB yang dilihat dari pendekatan produksi yang merupakan jumlah

nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu dimana unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 sektor. Sembilan sektor usaha produksi yang berada di Indonesia antara lain: pertanian; peternakan; kehutanan; perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik; gas; air bersih, bangunan, perdagangan; hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan; persewaan; dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Sektor-sektor usaha yang ada dalam perekonomian dikelompokkan kembali menjadi 3 bagian yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air serta sektor konstruksi. Sedangkan untuk sektor tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Tabel 4.2 Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Periode 2000-2014

Tahun	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel, Restoran	Pengangkutan Dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	Jasa-jasa
2000	216831,5	167 692,2	385 597,9	8 393,8	76 573,4	224 452,2	65 012,1	115 463,0	129753,8
2001	251727,0	181 839,5	478 311,4	10 854,8	93 790,6	264 983,6	77 187,6	135 369,5	152258,0
2002	281590,8	160 921,4	523 199,6	15 392,0	110 527,4	312 186,9	97 970,1	154 442,3	165602,9
2003	305783,5	167 572,3	568 920,3	19 144,2	125 337,1	335 100,4	118 916,4	174 074,5	198825,9
2004	329124,6	205 252,0	644 342,6	23 730,3	151 247,6	368 555,9	142 292,0	194 410,9	236870,3
2005	364169,3	309 014,1	760 361,3	26 693,8	195 110,6	431 620,2	180 584,9	230 522,7	276204,2
2006	433223,4	366 520,8	919 539,3	30 354,8	251 132,3	501 542,4	231 523,5	269 121,4	336258,9
2007	541931,5	440 609,6	1 068 653,9	34 723,8	304 996,8	592 304,1	264 263,3	305 213,5	398196,7
2008	716656,2	541 334,3	1 376 441,7	40 888,6	419 711,9	691 487,5	312 190,2	368 129,7	481848,3
2009	857196,8	592 060,9	1 477 541,5	46 680,0	555 192,5	744 513,5	353 739,7	405 162,0	574116,5
2010	985470,5	719 710,1	1 599 073,1	49 119,0	660 890,5	882 487,2	423 172,2	466 563,8	660365,5
2011	1091447,1	876 983,8	1 806 140,5	55 882,3	753 554,6	1 023 724,8	491 287,0	535 152,9	785014,1
2012	1193 452,9	972 458,4	1 972 523,6	62 271,6	844 090,9	1 148 791,0	549 105,4	598 433,3	889798,8

2013	1310 427,3	1 026 297,0	2 152 802,8	70 339,6	907 267,0	1 301 175,0	635 302,9	682 973,2	1000691,7
2014	446722,3	1 058 750,2	2 394 004,9	81 131,0	1 014 540,8	1 473 559,7	745 648,2	771 961,5	1108610,3

Sumber: BPS, 2014, data diolah

Tahun 2000 merupakan tahun dimana Indonesia mengalami pemulihan dari krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997/1998. Setelah krisis yang terjadi tahun 2000 dan tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang mana peningkatan yang terlihat lebih dominan dari waktu ke waktu adalah sektor industri pengolahan selain sektor pertanian yang menjadi salah satu sektro primer dalam PDB atas dasar lapangan usaha di Indoneisa. Pada tabel di atas terlihat bahwa selain pada sektor pertanian yang menjadi unggulan dari Indonesia juga menunjukkan penyumbang terbesar penerimaan Indonesia yang dilihat dari PDB menurut lapangan usaha adalah dari sektor industri pengolahan yang terdiri atas industri migas dan industri non migas. Menurut BPS (2014) menyatakan bahwa sektor industri migas terdiri atas: pengilangan minyak bumi, dan gas alam cair. Sedangkan untuk industri non migas terdiri atas: makanan; minuman; dan tembakau, tekstil; barang kulit; dan alas kaki, barang kayu; hasil hutan lainnya, kertas dan barang cetakan, pupuk; kimia dan barang dari karet, semen dan barang galian buka logam, logam dasar besi dan baja, alat angkutan; mesin dan peralatannya, dan barang lainnya. Pada sektor ini pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan PDB pada sektor yang lainnya. Sektor pertanian yang merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh Indonesia juga mengalami kenaikan yang baik pada beberapa tahun terakhir setelah terjadinya krisis global di Indonesia.

Sektor-sektor pekerjaan yang di Indonesia tentunya memerlukan tenaga kerja. Banyaknya lapangan usaha yang beraneka ragam sesuai sektornya menyerap tenaga kerja Indonesia sehingga masyarakat Indonesia yang menjadi angkatan kerja dalam umur produktif dapat mendapatkan pekerjaan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat dikatakan sangat banyak karena penambahan penduduk selalu terjadi setiap tahunnya. Dalam

kehidupannya para tenaga kerja berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga dengan melakukan suatu pekerjaan yang akhirnya akan memperoleh imbalan atas jasa-jasanya.

Penduduk suatu negara berperan penting dalam pembangunan suatu negara ataupun wilayah. Pembangunan suatu wilayah tergantung pada kualitas penduduk yang menghuni wilayah tersebut. Pada suatu wilayah keahlian dan keterampilan suatu tenaga kerja akan mempengaruhi perkembangan dari suatu wilayah. Indonesia sendiri pada pulau Jawa memiliki populasi penduduk yang besar dibandingkan wilayah Luar Jawa. Sejak tahun 1970an hingga lengsernya presiden Soeharto tahun 1998 dalam masalah kepadatan penduduk yang terjadi di Pulau Jawa, pemerintah berusaha untuk meratakan distribusi penduduk dengan program transmigrasi untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia yang lebih luas. Program yang dilakukan oleh pemerintah ini terkadang mendapat perhatian dari penduduk Indonesia yang berdampak pada berhasilnya transmigrasi tetapi dampak berdampak pada gagalnya pelaksanaan program tersebut, tidak berhasilnya program pemerataan penduduk di wilayah Indonesia ini dikarenakan terjadi konflik antara transmigran pendatang dari Jawa dengan populasi penduduk setempat. Pengembangan usaha yang berada di Luar Jawa juga mulai ditingkatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai daya tarik untuk penduduk Indonesia khususnya Wilayah Jawa untuk bekerja di wilayah Luar Jawa yang secara tidak langsung akan mensejahterakan tenaga kerja tersebut serta negara.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja, yang dijelaskan secara umum oleh UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 ayat 2 yaitu tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun masyarakatnya. Tenaga kerja Indonesia merupakan modal utama serta mencerminkan pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat pancasila adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjaga produktivitas

dari tenaga kerja itu sendiri. Perlindungan ini harus diperhatikan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut dimana pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan yang berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 1945 dan Pancasila. Indonesia juga memiliki permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang masih dalam penanganan oleh pemerintah dimana permasalahan yang terdapat pada ketenagakerjaan Indonesia adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata pada setiap daerah, dan adanya pengangguran.

Tabel 4.3 Tenaga Kerja di ASEAN 5

Tahun	Tenaga Kerja (%)				
	Indonesia	Malaysia	Thailand	Philiphina	Singapura
2004	9,9	3,5	2,1	11,8	-
2005	11,2	3,5	1,4	7,8	5,6
2006	10,3	3,3	1,5	7,8	2,6
2007	9,1	3,2	1,4	8,1	2,1
2008	8,4	3,3	1,4	7,4	2,2
2009	7,9	3,6	1,5	7,5	2,9
2010	7,1	3,3	1,0	7,3	2,1
2011	6,6	3,1	0,7	7,0	1,9
2012	6,1	3,0	0,7	7,0	1,8
2013	6,2	3,1	-	7,1	-

Sumber: BPS, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah tenaga kerja yang berada pada ASEAN 5 dimana Indonesia dari tahun 2004 memiliki jumlah tenaga kerja terbesar kedua setelah Philipina sebesar 11,8%. Namun setekah tahun 2005 jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia semakin turun. Indonesia memiliki banyak tenaga kerja karena setiap tahunnya terjadi pertumbuhan penduduk. Kondisi tenaga kerja di Indonesia masih terbilang buruk karena banyaknya tenaga kerja yang

ada tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, hal ini membuat tenaga kerja Indonesia mayoritas hanya bisa bekerja pada pekerjaan dengan upah yang masih cukup rendah. Beberapa tahun terakhir banyak ditetapkan peraturan yang bertujuan melindungi tenaga kerja dalam negeri, selain itu peningkatan kualitas juga semakin ditingkatkan oleh pemerintah. Adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan menambah kebebasan pihak luar untuk masuk ke Indonesia juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat kondisi tenaga kerja saat ini. Keterbukaan ekonomi Indonesia pada dunia luar termasuk dalam tenaga kerja juga bisa menjadi tekanan untuk Indonesia untuk memajukan kualitas serta produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kenyataannya tenaga kerja tidak semuanya terserap oleh kesempatan kerja maupun lapangan usaha yang ada karena setiap pekerjaan memiliki kriteria masing-masing yang membuat tenaga kerja tidak dapat terserap ataupun tidak menginginkan pekerjaan tersebut.

Pengangguran adalah permasalahan yang terjadi pada setiap negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja membuat tenaga kerja menganggur. Suatu pekerjaan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sosial di masyarakat. Pentingnya suatu pekerjaan merupakan suatu kerangka tujuan pembangunan Milenium di tingkat global dan terlihat dalam strategi pembangunan pemerintah di seluruh dunia (ILO, 2013). Masalah yang berhubungan dengan tingkat pengangguran tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga pada negara maju. Akan tetapi permasalahan pengangguran pada negara maju lebih mudah terselesaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daripada permasalahan pengangguran di negara berkembang karena hanya berkaitan dengan dengan fluktuasi siklus bisnis dan bukan dari faktor kelangkaan investasi, ledakan penduduk, atau masalah sosial dan politik di negara tersebut.

Pengangguran sangat erat kaitannya dengan upah karena pengusaha yang memproduksi akan memutuskan hubungan kerja atas dampak kenaikan upah yang diminta oleh tenaga kerja. Hal ini karena pada saat terjadi kenaikan upah para

pengusaha tidak memperhitungkan sebelumnya pada perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan kenaikan upah ini membuat biaya produksi akan naik karena upah merupakan komponen dari biaya produksi. Oleh karena itu hubungan antara pengangguran dan upah yaitu berjalan searah dimana pada saat terjadi kenaikan upah maka akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Pengangguran yang ada merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja atau dapat dikatakan tenaga kerja tidak terserap kesempatan kerja yang ada. Sempitnya lapangan usaha yang ada di Indonesia saat ini karena pelemahan nilai tukar dan kenaikan BBM secara tidak langsung membuat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia berpikir dua kali untuk menambahkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini membuat pemerintah mencoba mencari solusi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia dengan melatih para tenaga kerja untuk berjiwa wirausahawan dimana memunculkan minat terhadap tenaga kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang secara langsung menciptakan lapangan usaha yang baru. Beberapa tahun terakhir ini usaha ini memperlihatkan hasil dengan menurunnya pengangguran.

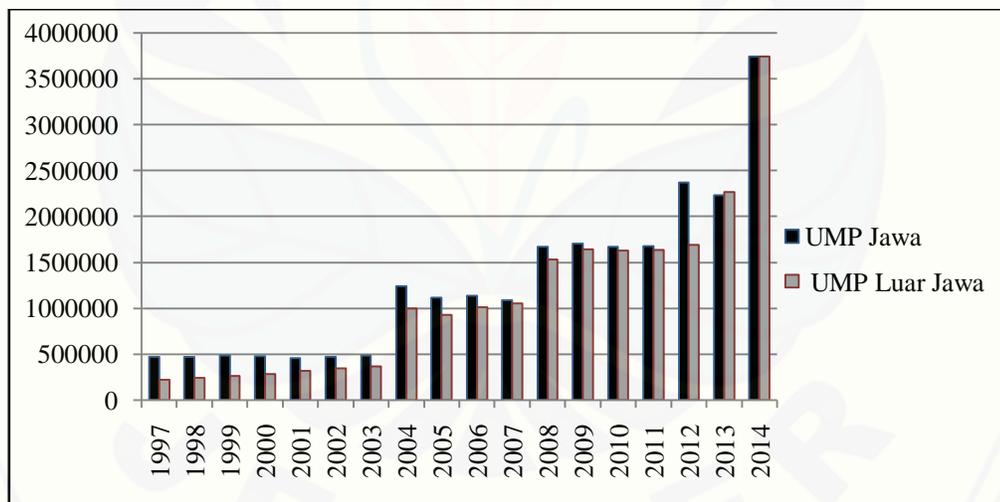
Upah merupakan pembayaran balas jasa yang diberikan oleh pengusaha atas jasa tenaga kerja yang telah bekerja untuk menghasilkan output. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab I pasal 1 nomor 30 menyatakan bahwa upah merupakan hak dari para pekerja yang diterima tenaga kerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha yang telah disepakati antar kedua belah pihak berlandaskan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Upah sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja karena pemberian upah pada tenaga kerja yang bekerja merupakan tujuan dari tenaga kerja tersebut bekerja. Indonesia sendiri yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan berbagai karakter. Berbagai gejolak yang terjadi di Indonesia menimbulkan tekanan bagi para tenaga kerja karena semakin turunnya tingkat kesejahteraan yang didapat. Gejolak ini memunculkan keinginan tenaga kerja memperoleh upah yang lebih tinggi dari yang disepakati oleh pengusaha. Pemerintah melihat kondisi ini mencoba untuk memberikan solusi dengan

menetapkan upah minimum yang digunakan sebagai acuan untuk pemberian upah pada semua wilayah.

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dijadikan sebagai pondasi dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan standar hidup bagi para pekerja (Widarti, 2006). Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh undang-undang yang dijadikan sebagai batas minimum bagi para pengusaha dalam memberi upah atau gaji bagi para tenaga kerja. Menurut (SMERU, 2001) pada tahun 2001 Indonesia mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana wewenang untuk menetapkan tingkat upah minimum dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Adanya kebijakan upah minimum dirasa mempunyai dampak terhadap penetapan upah di Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir adanya upah minimum menghambat peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menjadi penyebab inti dari perselisihan antar buruh. Sebelum krisis, upah minimum ditetapkan sekali dalam setahun, akan tetapi beberapa wilayah mengubah upah minimum menjadi lebih dari sekali dalam setahun. Akibat dari ketidakpastian tingkat upah pada setiap wilayah memunculkan masalah bagi pengusaha dalam menentukan besar dana yang akan dialirkan untuk produksi. Peningkatan upah yang tidak diperkirakan sebelumnya akan membuat perusahaan yang berproduksi akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kenaikan tingkat upah akan berdampak kenaikan penawaran output yang dipasarkan. Upah minimum secara tidak langsung mengurangi insentif bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyetaraan pemberian antara tenaga kerja terampil dan setengah terampil, akibatnya para tenaga kerja membatasi diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan suatu output yang berkualitas.

Iklim pertumbuhan yang tinggi beberapa tahun ini di Indonesia, peningkatan dalam upah minimum sendiri tidak terlalu menjadi masalah karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan upah. Adanya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan memperluas kesempatan kerja daripada yang

hilang karena kebijakan upah minimum (SMERU, 2001). Berdasarkan gambar 4.6 di bawah menunjukkan adanya pertumbuhan Upah Minimum Provinsi di Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa pada beberapa tahun terakhir UMP mengalami peningkatan di Jawa begitu pula dengan yang berada di Luar Jawa. pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada UMP Jawa daripada tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 2.231.338 juta, tetapi tidak terjadi pada Luar Jawa yang hanya mengalami peningkatan lebih kecil daripada Jawa. Hal ini dapat dikarenakan perbedaan kegiatan ekonomi yang ada di setiap daerah di Jawa dan Luar Jawa. UMP merupakan batasan pemberian upah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat. Setiap tahunnya pemerintah melakukan penyesuaian peningkatan upah minimum dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi setiap wilayahnya. Oleh karena itu, penetapan upah minimum di Jawa dan Luar Jawa mengalami perbedaan walaupun perbedaan tersebut tidak terlampau jauh.



Gambar 4.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) secara Riil di Jawa dan Luar Jawa (Sumber: BPS, 2014, data diolah)

Perbedaan kondisi sosial ekonomi yang berada pada setiap daerah di Indonesia khususnya di Wilayah Jawa dan Luar Jawa membuat perbedaan penetapan UMP oleh pemerintah. Kondisi ini dikarenakan Wilayah Jawa merupakan pusat

kegiatan ekonomi dimana terdapat tenaga yang bekerja serta kecepatan informasi yang ada membuat Wilayah Jawa akan cepat merespon atas gejolak yang ada. Sedangkan pada Wilayah Luar Jawa tenaga kerja yang tidak merata serta kelambanan informasi yang didapat membuat peningkatan upah tidak terlalu cepat merespon suatu gejolak yang terjadi di Indonesia. Penetapan upah minimum sendiri didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adanya penetapan upah minimum adalah untuk pencapaian KHL tenaga kerja Indonesia atau kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Distribusi tenaga kerja yang tidak merata serta kondisi geografis dan ekonomi dari beberapa wilayah di Indonesia membuat para tenaga kerja berpindah dari wilayah tempat tinggalnya ke tempat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk kesejahteraannya. Dalam hal ini upah berpengaruh karena upah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Pada tahun 2014 pemerintah menetapkan upah minimum diatas 3 juta atas pertimbangan kondisi perekonomian yang terjadi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak serta depresiasi nilai Rupiah terhadap Dollar AS yang menyebabkan para tenaga kerja menekan pemerintah dan pengusaha untuk meningkatkan upah yang didapatkan.

#### **4.2 Analisis Model Kausalitas Granger pada Inflasi dan UMP di Indonesia**

Subbab ini akan menjelaskan mengenai hasil kuantitatif dari model Kausalitas Granger untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tentang hubungan kausalitas antara inflasi dan UMP. Pada penelitian ini UMP di Indonesia dilihat secara riil yang dimana data yang digunakan diperoleh dari perhitungan upah riil yaitu upah nominal UMP dibagi dengan IHK yang telah disamakan tahun dasarnya. Data UMP pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa. Data inflasi yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat inflasi yang dilihat dari IHK. Berikut ini adalah pemaparan hasil analisis dari uji-uji

yang dilakukan dalam kausalitas Granger terhadap Inflasi dan UMP di Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa.

#### 4.2.1 Hasil Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Uji merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum mengestimasi model dalam data *time series*. Uji Akar Unit dapat dikatakan sebagai uji stasioneritas dimana merupakan uji yang bertujuan melihat kestasioneritasan data pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* dalam uji akar unit. Dalam Uji *Augmented Dickey-Fuller* data dikatakan stasioner apabila nilai t-statistik ADF lebih besar dibandingkan dengan *test critical value* dan sebaliknya apabila data memiliki nilai t-statistik yang lebih kecil dibandingkan dengan *test critical value* maka dalam uji *Augmented Dickey-Fuller* data tersebut dikatakan tidak stasioner.

Pada tabel 4.4 memperlihatkan hasil dari uji akar-akar unit dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller*. Uji ini melihat pada tingkat berapa variabel yang digunakan dalam penelitian stasioner. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa variabel INF, UMP Jawa dan UMP Luar Jawa tidak stasioner pada tingkat Level. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih kecil daripada nilai kritisnya yang dilihat dari variabel UMP Jawa pada *none*  $1.807567 < 1\% = -2.708094$ ,  $5\% = -1.962813$ , dan  $10\% = -1.606129$ ; *intercept*  $-0.058289 < 1\% = -3.886751$ ,  $5\% = -3.052169$ , dan  $10\% = -2.666593$ ; *trend and intercept*  $-3.111999 < 1\% = -4.616209$ ,  $5\% = -3.710482$ , dan  $10\% = -3.297799$ . Hasil dari uji akar unit yang menunjukkan data tidak stasioner pada tingkat Level menunjukkan bahwa diperlukan uji lebih lanjut untuk melihat kestasioneran data dengan menggunakan uji derajat integrasi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji *Augmented Dickey-Fuller*

Variabel	Tingkat Level			Tingkat <i>First Difference</i>		
	None	Intercept	Trend & Intercept	None	Intercept	Trend & Intercept
INF	-1.465060 <sup>x</sup>	-4.258880****	-12.02763****	-9.008459****	-8.413901****	-4.267366***
UMP Jawa	1.807567 <sup>x</sup>	-0.058289 <sup>x</sup>	-3.111999 <sup>x</sup>	-3.958051****	-4.892517****	-4.867398****
UMP Luar Jawa	2.638039 <sup>x</sup>	-0.117436 <sup>x</sup>	-2.538394 <sup>x</sup>	-2.969657****	-4.253248****	-4.112457***

<sup>x</sup>) tidak stasioner, \*) stasioner pada  $\alpha = 1\%$ , \*\*) stasioner pada  $\alpha = 5\%$ , \*\*\*) stasioner pada  $\alpha = 10\%$ , \*\*\*\*) stasioner pada  $\alpha = 1\%$ ,  $\alpha = 5\%$ ,  $\alpha = 10\%$

Sumber: Lampiran B, diolah

Pada tingkat *first difference* semua variabel dapat dikatakan stasioner seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Kestasioneran data ini dapat dilihat dari nilai t-statistik lebih besar daripada nilai kritisnya, seperti UMP Jawa pada *none*  $-3.958051 > 1\% = -2.717511$ ,  $5\% = -1.964418$ , dan  $10\% = -1.605603$ ; *intercept*  $-4.892517 > 1\% = -3.920350$ ,  $5\% = -3.065585$ , dan  $10\% = -2.673459$ ; *trend and intercept*  $-4.867398 > 1\% = -4.667883$ ,  $5\% = -3.733200$ , dan  $10\% = -3.310349$ . Data yang telah stasioner ini akan dilanjutkan pada uji kointegrasi untuk melihat apakah antar variabel penelitian terdapat keseimbangan jangka panjang di dalamnya.

#### 4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi (*Johansen Cointegration Test*)

Uji kointegrasi merupakan keberlanjutan dari uji sebelumnya yaitu uji derajat integrasi yang bertujuan untuk melihat apakah variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Melihat keseimbangan jangka panjang pada variabel dapat dilihat dengan membandingkan nilai *trace statistic* dengan nilai kritis. Apabila nilai *trace statistic* lebih besar daripada nilai kritisnya maka variabel tersebut dikatakan memiliki keseimbangan jangka panjang, begitupun sebaliknya jika nilai *trace statistic* lebih kecil daripada nilai kritisnya maka

dikatakan variabel tersebut tidak memiliki keseimbangan jangka panjang. Pada penelitian ini uji kointegrasi yang digunakan menggunakan metode *Johansen Cointegration Test* yang dapat dilihat dari tabel 4.5 dan 4.6 di bawah.

Tabel 4.5 Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode *Johansen Cointegration Test* pada Pulau Jawa

	<i>Trace Statistic</i>	Nilai Kritis	Keterangan
<b>1%</b>	43.66183	19.93711	Terdapat kointegrasi
<b>5%</b>	43.66183	15.49471	Terdapat kointegrasi
<b>10%</b>	43.66183	13.42878	Terdapat kointegrasi

Sumber: Lampiran C, diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil uji kointegrasi (*Johansen Cointegration Test*) antara variabel INF dan UMP Jawa dimana dari hasil uji ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kointegrasi pada variabel tersebut. hal ini terlihat dari nilai *trace statistic* pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai kritis pada  $\alpha=1\%$ ,  $5\%$ , dan  $10\%$ . Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *trace statistic* INF dan UMP Jawa lebih besar dari nilai kritisnya ( $43.66183 > 19.93711$ ,  $15.49471$ , dan  $13.42878$ ).

Tabel 4.6 Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode *Johansen Cointegration Test* pada Pulau Luar Jawa

	<i>Trace Statistic</i>	Nilai Kritis	Keterangan
<b>1%</b>	42.96249	19.93711	Terdapat kointegrasi
<b>5%</b>	42.96249	15.49471	Terdapat kointegrasi
<b>10%</b>	42.96249	13.42878	Terdapat kointegrasi

Sumber: Lampiran C, diolah

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji kointegrasi pada Pulau Luar Jawa yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel tersebut. hal ini dilihat dari nilai *trace statistic* pada masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai kritisnya ( $42.96249 > 19.93711, 15.49471, \text{ dan } 13.42878$ ). Pengujian kointegrasi yang telah ditunjukkan pada tabel 4.2 dan 4.3 memperlihatkan bahwa pada variabel penelitian ini memiliki hubungan kesimbangan jangka panjang, selanjutnya akan dilakukan uji kausalitas granger yang melihat hubungan timbal balik antar variabel.

#### 4.2.3 Hasil Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*)

Uji kausalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan timbal balik yang diduga memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain antara dua variabel yang diteliti yaitu inflasi (INF) dan upah minimum provinsi (UMP) yang ada di Jawa dan Luar Jawa. Pada penelitian ini memperoleh hasil dari uji kausalitas granger pada variabel INF dan UMP Jawa dengan menggunakan empat lag (2, 3, 4, dan 5) untuk menemukan hasil yang terbaik mendekati kipotesis penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil *Granger Causality Test* untuk variabel INF dan UMP Jawa

Lag	<i>Null Hypothesis</i>			Nilai		Keterangan
				F-statistik	Probabilitas	
2	UMP	Jawa	tidak	2.09417	0.1739	Tidak terdapat hubungan kausalitas
	INF	tidak	mempengaruhi UMP Jawa	0.21109	0.8132	
3	UMP	Jawa	tidak	1.76918	0.2403	Tidak terdapat

	mempengaruhi INF					hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Jawa	0.42480	0.7414			kausalitas
<b>4</b>	UMP Jawa tidak mempengaruhi INF	1.05325	0.4806			Tidak terdapat hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Jawa	1.09185	0.4671			kausalitas
<b>5</b>	UMP Jawa tidak mempengaruhi INF	205.386	0.0529			Terdapat hubungan satu arah UMP Jawa ke INF
	INF tidak mempengaruhi UMP Jawa	1.66915	0.5261			

Sumber: Lampiran D, diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hubungan searah antara dua variabel INF dan W (UMP Jawa) di Indonesia tahun 1997-2014 yang ada pada lag 5. Dalam penentuan signifikansi pada hubungan variabel penelitian tersebut adalah dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Pada dasarnya pengujian dengan *granger causality* ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (*null hypothesis*) dari masing-masing lag 2 hingga lag 4. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara dua variabel penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- (i)  $H_0$  : UMP Jawa tidak mempengaruhi INF  
 $H_1$  : UMP Jawa mempengaruhi INF
- (ii)  $H_0$  : INF tidak mempengaruhi UMP Jawa  
 $H_1$  : INF mempengaruhi UMP Jawa

Dalam pengujian hipotesis nol dengan metode ini terdapat kriteria yang menyebutkan bahwa jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka hipotesis nol ditolak dan menjelaskan bahwa variabel signifikan saling mempengaruhi dan

sebaliknya. Sebaliknya apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka hipotesis nol diterima dan dapat dijelaskan bahwa variabel tidak signifikan saling mempengaruhi. Penentuan signifikansi juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya, jika nilai probabilitas hitung lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  maka hipotesis nol ditolak dan menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi.

Pada tabel 4.7 pengujian granger pada lag 2 menunjukkan pengujian variabel UMP Jawa dan INF dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.1739 > 0.1$ ), hasil ini menyebutkan bahwa  $H_0$  diterima (UMP Jawa tidak mempengaruhi INF) sehingga dapat dijelaskan bahwa besarnya UMP Jawa tidak berpengaruh pada Inflasi di Indonesia. Selanjutnya, pada pengujian INF dan UMP Jawa memberikan hasil dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.8132 > 0.1$ ), hasil ini juga menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Jawa) dengan penjelasan bahwa besarnya tingkat inflasi di Indonesia tidak berpengaruh pada UMP yang berada di wilayah Pulau Jawa. Dengan demikian, pada lag 2 secara umum dapat dikatakan tidak terdapat hubungan dua arah ataupun searah antara variabel INF dan UMP Jawa atas pengujian kausalitas granger.

Pada pengujian lag 3 menunjukkan hasil pengujian antara variabel UMP Jawa dan INF dengan memperoleh hasil nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.2403 > 0.1$ ) yang menjelaskan bahwa  $H_0$  diterima (UMP Jawa tidak mempengaruhi INF) dimana besarnya UMP Jawa tidak berpengaruh pada inflasi di Indonesia. Selanjutnya pengujian kausalitas antara variabel INF dan UMP Jawa menunjukkan hasil dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.7414 > 0.1$ ) dengan  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Jawa) yang menjelaskan bahwa besarnya Inflasi yang ada di Indonesia tidak berpengaruh pada UMP di Jawa. Hasil pengujian kausalitas di atas pada lag 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah antara variabel UMP Jawa dan Inflasi.

Pengujian pada lag 4 menunjukkan hasil antara variabel UMP Jawa dan INF dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.4806 > 0.1$ ) dengan

$H_0$  diterima (UMP Jawa tidak mempengaruhi INF) dimana memberikan penjelasan bahwa pada lag 4 besarnya UMP Jawa tidak berpengaruh pada Inflasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pengujian variabel INF dan UMP Jawa diketahui nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.4671 > 0.1$ ) dengan  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Jawa) dimana memberi penjelasan bahwa inflasi di Indonesia tidak berpengaruh pada besarnya UMP Jawa. Hasil dari pengujian pada lag 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah antara variabel UMP Jawa dan INF di Indonesia.

Pengujian kausalitas pada lag 5 menunjukkan hasil yang berbeda pada lag sebelumnya dimana pengujian antara variabel UMP Jawa dan INF dengan nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.0529 < 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  ditolak (UMP Jawa tidak mempengaruhi INF) dan  $H_1$  diterima (UMP Jawa mempengaruhi inflasi) dengan memberikan penjelasan bahwa besarnya UMP Jawa pada hasil pengujian lag 5 berpengaruh pada tingkat Inflasi di Indonesia. Selanjutnya pada pengujian kausalitas variabel INF dan UMP Jawa dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.5261 > 0.1$ ) dengan hipotesis  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Jawa) dan  $H_1$  ditolak (INF mempengaruhi UMP Jawa) yang memberikan penjelasan bahwa besarnya tingkat inflasi di Indonesia tidak berpengaruh pada besarnya UMP Jawa. Pada pengujian kausalitas pada lag ini tidak terdapat hubungan dua arah antara variabel penelitian, tetapi hanya terdapat hubungan satu arah yaitu pada variabel UMP Jawa dan INF dimana UMP Jawa mempengaruhi INF sedangkan INF tidak mempengaruhi UMP Jawa.

Pada tabel 4.8 menunjukkan hasil dari pengujian kausalitas antara variabel INF dan UMP pada wilayah Luar Jawa. Sejalan dengan tabel 4.7, pada hasil pengjian tabel 4.8 menguji hipotesis nol (*null hypothesis*) dari masing-masing lag 2 sampai lag 5. Hasil pengujian juga dilihat dari nilai probabilitas F-statistik jika lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  maka hipotesis nol diterima dan sebaliknya. Berikut hipotesis dari dua variabel penelitian tersebut:

- (i)  $H_0$  : UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF  
 $H_1$  : UMP Luar Jawa mempengaruhi INF
- (ii)  $H_0$  : INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa  
 $H_1$  : INF mempengaruhi UMP Luar Jawa

Tabel 4.8 Hasil *Granger Causality Test* untuk variabel INF dan UMP Luar Jawa

Lag	Null Hypothesis	Nilai		Keterangan
		F-statistik	Probabilitas	
2	UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF	2.87398	0.1032	Tidak terdapat hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa	0.09712	0.9083	kausalitas
3	UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF	2.32791	0.1611	Tidak terdapat hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa	0.11108	0.9509	kausalitas
4	UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF	1.04238	0.4844	Tidak terdapat hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa	0.39573	0.8044	kausalitas
5	UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF	1.15957	0.6043	Tidak terdapat hubungan
	INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa	38.7038	0.1214	kausalitas

Sumber: Lampiran D, diolah

Berdasarkan hasil pengujian kausalitas pada tabel 4.8 di atas pada lag 2 menunjukkan hasil pengujian variabel UMP Luar Jawa dan INF dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.1032 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis

$H_0$  diterima (UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF) yang menjelaskan bahwa besarnya UMP di wilayah Luar Jawa tidak berpengaruh pada tingkat Inflasi yang ada di Indonesia. Pada pengujian variabel INF dan UMP Luar Jawa dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.9083 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa) yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh pada besarnya UMP Luar Jawa. Dengan demikian, sesuai hasil pengujian kausalitas pada lag 2 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dua arah antara variabel UMP Luar Jawa dan INF di Indonesia.

Pada lag 3 pengujian kausalitas dengan variabel UMP Luar Jawa dan INF yang menghasilkan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.1611 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF) yang menjelaskan bahwa besarnya UMP Luar Jawa tidak berpengaruh pada tingkat Inflasi di Inflasi. Selanjutnya pengujian pada variabel INF dan UMP Luar Jawa dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.9509 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa) yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh pada besarnya UMP Luar Jawa. Dengan demikian, sesuai hasil pengujian kausalitas pada lag 3 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dua arah antara variabel UMP Luar Jawa dan INF di Indonesia.

Pengujian lag 4 pada variabel UMP Luar Jawa dan INF yang menunjukkan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.4844 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF) dimana dapat dikatakan bahwa besarnya UMP Luar Jawa tidak berpengaruh pada inflasi di Indonesia. Pada variabel INF dan UMP Luar Jawa hasil pengujian menghasilkan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.8044 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa) yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi yang ada di Indonesia tidak berpengaruh pada UMP Luar Jawa. Hasil secara garis besar dari pengujian kausalitas pada lag 4 menghasilkan tidak ada hubungan dua arah antara variabel UMP Luar Jawa dan INF di Indonesia.

Berdasarkan pengujian kausalitas pada lag 5 tidak berbeda dengan pengujian pada lag sebelumnya. Pada variabel UMP Luar Jawa dan INF dimana nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.6043 > 0.1$ ) dengan hasil hipotesis  $H_0$  diterima (UMP Luar Jawa tidak mempengaruhi INF) yang menunjukkan bahwa besarnya UMP Luar Jawa tidak berpengaruh pada inflasi yang ada di Indonesia. Pada pengujian selanjutnya pada variabel INF dan UMP Luar Jawa diketahui nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  ( $0.1214 > 0.1$ ), hasil hipotesis yang didapatkan dari pengujian ini adalah  $H_0$  diterima (INF tidak mempengaruhi UMP Luar Jawa) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia tidak berpengaruh pada besarnya UMP Luar Jawa. Dengan demikian, hasil dari pengujian kausalitas pada lag ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan dua arah antara variabel penelitian yaitu UMP Luar Jawa dan INF di Indonesia.

#### **4.3 Pembahasan Analisis Hubungan Kausalitas Inflasi Dan UMP di Indonesia**

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang bisa dibilang sangat penting untuk pembangunan suatu negara. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Tenaga kerja yang berkualitas akan berperan aktif terhadap meningkatkan perekonomian negara menuju sasaran yang direncanakan. Pembahasan tentang tenaga kerja tidak lepas dari penentuan upah yang akan diterima tenaga kerja yang bekerja. Pemberian upah ini sejalan dengan tujuan seseorang bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Pada mayoritas negara memiliki masalah ekonomi yang sama yaitu pengangguran dan inflasi. Masalah ini juga terjadi di Indonesia dimana tidak semua tenaga kerja yang ada di Indonesia terserap oleh lapangan usaha yang disediakan, begitu pula dengan kenaikan harga-harga umum yang mengalami fluktuasi di Indonesia sendiri berdampak kepada kesejahteraan penduduk yang semakin tertekan. Pengangguran secara tidak langsung berhubungan dengan upah yang diberikan oleh

pengusaha, apabila upah meningkat akan membuat pengusaha memilih untuk memutuskan hubungan kerja yang secara langsung berdampak pada peningkatan pengangguran. Indonesia memiliki banyak wilayah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, akan tetapi distribusi tenaga kerja yang tidak merata membuat pembangunan suatu wilayah juga mengalami kendala.

Hasil analisis yang telah diperoleh dari penelitian antara UMP dan inflasi di Wilayah Jawa menunjukkan ketidaksesuaian hasil dengan hipotesis yang telah ditentukan pada awal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah pada UMP terhadap inflasi Indonesia pada Lag 5. Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan pertumbuhan UMP sekitar 5 tahun sebelumnya (Lag 5) mempunyai pengaruh pada pertumbuhan inflasi di Indonesia pada saat ini. Perubahan UMP tidak langsung berdampak pada upah sesuai dengan asumsi harapan adaktif dimana adanya perubahan akan secara bertahap mempengaruhi inflasi. Hal ini terjadi pada penelitian ini dimana perubahan upah minimum di Wilayah Jawa tidak langsung berdampak pada inflasi pada saat ini tetapi bertahap berdasarkan 5 tahun sebelumnya karena masyarakat tidak langsung berekspektasi bahwa kenaikan upah akan menaikkan biaya produksi dan selanjutnya menaikkan inflasi. Apabila dikaitkan dengan periode waktu yang digunakan dalam penelitian maka dapat dijelaskan bahwa kondisi perekonomian pada 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 yang berkaitan dengan pertumbuhan UMP akan berdampak pada perubahan inflasi Indonesia tahun 2014. Hasil ini didukung oleh penelitian Palley (1999) dimana dijelaskan bahwa hubungan antara upah dan inflasi bervariasi mengikuti siklus bisnis yang terdapat pada negara tersebut. Indonesia selalu mengalami kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi sesuai dengan gejala yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar Indonesia.

Kondisi Indonesia khususnya Pulau Jawa pada tahun 2009 masih dikatakan tertekan akibat dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan mencapai puncaknya pada triwulan terakhir pada tahun 2008. Pada triwulan pertama tahun 2009 pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan yang mencapai angka 4,5%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan karena turunnya kinerja ekspor di Indonesia dimana dengan adanya krisis global yang terjadi membuat permintaan produk ekspor yang ada di berbagai daerah mengalami penurunan yang mengakibatkan penawaran lebih besar daripada permintaannya. Penyebab lain dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah turunnya kinerja sektor unggulan di berbagai daerah. Beberapa sektor unggulan seperti industri pengolahan yang mengalami penurunan akibat dari turunnya kapasitas utilitas industri sebagai respon dari kurangnya permintaan akan produk ekspor dan naiknya biaya produksi. Perbaikan pada perekonomian Indonesia dimulai pada triwulan kedua tahun 2009 dengan masih kuatnya konsumsi untuk menyambut pemilu presiden dan perbaikan ekspor yang pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan dan juga sektor-sektor usaha juga mulai membaik. Dampak yang ditimbulkan oleh gejolak yang disebabkan baik dari dalam atau luar negeri di Indonesia setiap daerah berbeda dalam merespon dampak gejolak tersebut. Indonesia selalu mengharapkan kondisi perekonomian yang ideal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan yang disertai dengan stabilnya harga serta kesempatan kerja yang terbuka luas untuk tenaga kerja Indonesia.

Penelitian upah dan inflasi Indonesia di Wilayah Jawa dengan menunjukkan hubungan searah jika dilihat dari kondisi perekonomian tahun 2009 yang terkait dengan UMP sesuai dengan teori strukturalis. Teori ini menyebutkan bahwa ketidakjelasan ekspor dapat menimbulkan perubahan inflasi di suatu negara. Kondisi ekspor yang memburuk pada tahun 2009 menyebabkan kenaikan biaya produksi yang salah satunya adalah upah, kenaikan upah ini yang secara bertahap mempengaruhi inflasi Indonesia pada saat ini. Ketidaksesuaian antara hipotesis penelitian dengan hasil penelitian yang berada di Wilayah Jawa dapat disebabkan karena rentang periode waktu yang digunakan sebagai sampel penelitian tidak mampu menggambarkan hubungan yang terjadi antara inflasi dan upah minimum Indonesia.

Sedangkan pada penelitian UMP dan inflasi Indonesia di Wilayah Luar Jawa ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara upah dan inflasi sesuai dengan sampel waktu yang digunakan dalam penelitian. Sejalan dengan Wilayah Jawa, hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan di awal dimana pada hipotesis menyebutkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara UMP dan inflasi di Indonesia. Ketidaksesuaian hipotesis penelitian dengan hasil penelitian antara upah dan inflasi di Wilayah Luar Jawa dapat disebabkan dari kondisi Wilayah Luar Jawa. Kondisi di Wilayah Luar Jawa berbeda dengan Wilayah Jawa secara ekonomi, sosial, dan budaya yang berada pada setiap wilayahnya. Wilayah Luar Jawa memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dikatakan besar tetepai tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Wilayah Luar Jawa. Penduduk yang berasal dari Luar Jawa lebih memilih untuk berpindah ke wilayah Jawa demi memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Distribusi tenaga kerja yang tidak merata di setiap daerah membuat distribusi pendapatan juga terhambat pada setiap daerah. Rendahnya pengembangan sektor di Wilayah Luar Jawa juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih rendah daripada Wilayah Jawa.

Berdasarkan periode waktu yang digunakan dalam penelitian dirasakan belum dapat menggambarkan keadaan dan hubungan yang terjadi antara upah minimum dan inflasi Indonesia di Wilayah Luar Jawa. Hasil yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara variabel upah minimum dan inflasi di Wilayah Luar Jawa disebabkan karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi inflasi di Indonesia seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang disebabkan karena adanya pemotongan subsidi pemerintah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap inflasi adalah pelemahan nilai Rupiah terhadap Dollar yang menyebabkan harga-harga barang yang berada di setiap daerah mengalami kenaikan. Fenomena ini didukung oleh penelitian Azis dan Fares (2010) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara upah dan inflasi dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar upah yang mempengaruhi inflasi seperti gonjangan pasokan yang terjadi di negara tersebut,

atau kebijakan ekspansif moneter dan fiskal, maupun dari inflasi impor. Sedangkan UMP di Wilayah Luar Jawa ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat dimana kewenangan merubah upah minimum terdapat pada pemerintah daerah. Kenaikan UMP di Wilayah Luar Jawa sedikit dibawah Wilayah Jawa dikarenakan selain kondisi ekonomi dan sosial juga adanya kondisi politik yang memunculkan perbedaan. Masih kurangnya produktivitas dari tenaga kerja di wilayah Luar Jawa dan kualitas tenaga kerja yang masih lemah membuat penetapan UMP yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlalu mempengaruhi inflasi di Indonesia tetapi selalu berpengaruh pada inflasi daerah di wilayah Luar Jawa.

Adanya era otonomi daerah memberikan dampak pada pemerataan ekonomi untuk daerah yang ada di Indonesia. Tujuan dari penerapan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih untuk Wilayah Luar Jawa berkembang dan tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan Wilayah Luar Jawa akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga Wilayah Luar Jawa juga dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Daya saing wilayah Luar Jawa masih rendah daripada Wilayah Jawa karena keterbatasan tenaga kerja yang berkualitas serta infrastruktur untuk mengembangkan sektor yang ada pada wilayah tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan infrastruktur yang ada di Wilayah Luar Jawa agar dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia secara garis besar berbeda dengan negara berkembang lainnya baik secara ekonomi, sosial dan budayanya. Meskipun merupakan negara berkembang, kondisi perekonomian suatu negara satu dengan negara lainnya sangat berbeda dapat dilihat dari respon negara tersebut dalam menghadapi suatu gejolak yang terjadi. Hal ini terlihat di Indonesia dimana kondisi perekonomian Indonesia berbeda dari negara-negara lain yang merupakan negara berkembang seperti Mesir dan Iran pada penelitian sebelumnya. Indonesia memiliki pulau-pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap wilayahnya. Perbedaan ini dilihat dari ekonomi, sosial, dan budaya yang beraneka ragam di wilayah-wilayah yang berada di Indonesia. Dalam

hal kecepatan merespon suatu gejolak di Indonesia setiap daerah berbeda. Permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia sama dengan negara lainnya yaitu masalah tentang pengangguran dan inflasi yang sangat berfluktuatif dan saling berpengaruh. Setiap negara menginginkan negaranya mengalami pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami kenaikan secara terus menerus dan kestabilan harga serta penyediaan kesempatan kerja yang luas untuk menyerap tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan penetapan upah yang dilakukan oleh pengusaha. Indonesia memiliki pengangguran yang cukup besar setiap tahunnya dimana apabila terjadi gejolak ekonomi yang terjadi seperti penurunan ekspor akan menimbulkan kelebihan penawaran yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini akan menimbulkan kenaikan harga-harga barang yang ada di pasar.

Tahun 2014 daya saing di daerah Indonesia mulai menjadi perhatian pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia. Tren perekonomian global yang akan terjadi dengan mengikutsertakan Indonesia didalamnya adalah keterbukaan ekonomi dimana semakin terbukanya informasi dan perdagangan antar negara. Negara-negara yang berada pada keterbukaan ekonomi ini bersatu sebagai antisipasi terhadap globalisasi seperti MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi yang terjadi saat ini Indonesia harus mampu bertahan dan bersaing dengan mengembangkan daya saing di negara tersebut. daya saing tidak hanya di kembangkan pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan Indonesia tetapi juga harus di semua wilayah yang berada di Indonesia. Daya saing di Indonesia dibentuk dari adanya interaksi aktivitas yang terjadi di setiap daerah seperti perbedaan lingkungan produktif, struktur dan kondisi perekonomian daerah, perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari jumlah dan kualitasnya, infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA) dan kondisi lembaga keuangan dan perbankan pada daerah tersebut.

## **BAB 5. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan yang akan dijelaskan pada bab ini, akan diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan baik saran ekonomi sebagai rekomendasi kebijakan dari penulis bagi perekonomian Indonesia sesuai keadaan yang ada terkait dengan inflasi dan UMP serta saran metodologis untuk rekomendasi penulis selanjutnya agar didapatkan hasil penelitian yang terkait dengan inflasi dan UMP yang lebih baik.

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada subbab ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Wilayah Jawa Indonesia terdapat hubungan satu arah antara UMP dan Inflasi Indonesia. Hal ini berarti peningkatan pada UMP Wilayah Jawa berpengaruh pada tingkat inflasi Indonesia.
2. Hasil yang ditemukan pada Wilayah Luar Jawa tidak sejalan dengan hasil yang ada di Wilayah Jawa yaitu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara kedua variabel yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa peningkatan pada UMP tidak mempengaruhi penurunan dan peningkatan inflasi Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan pada subbab di atas maka akan diberikan beberapa saran yang ditujukan sebagai referensi bagi pihak yang bersangkutan dengan variabel penelitian ini. Saran ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kemajuan perekonomian Indonesia menuju tujuan yang diharapkan kedepannya. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk perekonomian Indonesia:

1. Dengan adanya pengaruh antara upah minimum dan inflasi di Jawa perlu adanya kebijakan yang dapat meratakan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas para tenaga kerja agar kenaikan upah minimum akan sebanding upah yang diberikan oleh pengusaha akan sejalan dengan produktivitas yang diberikan. Maka dengan demikian maka kenaikan inflasi tidak terlalu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
2. Pada Wilayah Luar Jawa perlu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan SDA sehingga tenaga kerja akan tertarik untuk bekerja di Luar Jawa yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan menstabilkan inflasi.
3. Perlunya penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan upah dan inflasi di Indonesia serta penggunaan sampel yang lebih luas karena sampel yang sebanyak 18 dirasa tidak mampu menjawab permasalahan secara lebih tepat pada penelitian ini. Penelitian lebih lanjut ditujukan agar penelitian lebih mendalam dan bisa lebih efektif dalam pemberian solusi untuk kebijakan selanjutnya.

**DAFTAR BACAAN**

- Aaronson, Daniel., and French, Eric. 2013. How Does a Federal Minimum Wage Hike Affect Aggregate Household Spending?. *Chicago Fed Letter. Essays on Issues. The Federal Reserve Bank of Chicago. Number 313.*
- Atmadja, Adwin S. 1999. Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, 54-67.*
- Aziz, A.A. Abdel & Fares, Hala. 2010. A Granger Causality Test between Wage-Inflation and Price Inflation: A Case Study on the Egyptian Economy. *Interstat Journal, August, 2010.*
- Bank Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional: Laporan Nusantara, Vol 9, No. 1.*
- BAPEPAM-LK. 2008. Analisis Hubungan Kointegrasi dan Kausalitas serta Hubungan Dinamis antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar dan Pergerakan Ihsq di Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Case, Karl E., and Fair, Ray C. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.
- Cacnio, Faith Christian Q. 2011. Do Higher Wages Cause Inflation?. *Economic Newsletter. Bangko Sentral No Pilipinas No. 11-01.*
- Charysa, Ninda Noviani. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal 2 (4).*
- Christoffel, Kai., Costain, James., Walque, Gregory de., Kuester, Keith., Lizert, Tobias., Milard, Stephen., and Pierrard, Olivier. 2009. Wage, Inflation and

- Employment Dynamic with Labour Market Matching. *Documentos de Trabajo No. 0918*.
- Cunningham, Prof Steve. Tanpa Tahun. Phillips Curve: Macroeconomics. USA: University of Connecticut. [Web.uconn.edu//cunningham](http://Web.uconn.edu//cunningham). [27 Januari 2015].
- Dharmayanti, Yeny. 2011. Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. *Skripsi*.
- Froyen, Richard T. 2002. *Macroeconomics: Theories and Policies*. United State of America: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Alih bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hajji, Muhammad Shun., SBM, Nugroho. 2013. Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa tengah Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics, Vol. 2, No. 3, Hal:1-10, ISSN: 2337-3814*.
- Handoko, Roby. 2014. Kausalitas Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Thailand Tahun 1983-2012. Jember: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. *Skripsi*.
- Hess, Gregory D., and Schweitzer, Mark E. 2000. Does Wage Inflation Cause Price Inflation?. *Policy Discussion Papers, Number 1*.
- Headey, Derek., Nisrane, Fantu Bachewe., Worku, Ibrahim., Dereje, Mekdim., and Taffesse, Alemayehu Seyoum. 2012. Urban Wage Behavior and Food Price Inflation: The Case of Ethiopia. *Working Paper 41*.
- Hess, Gregory D. 1999. Does Wage Inflation Cause Price Inflation?. *Wall Street Journal. Shadow Open Market Committee*. September 3, 1999.
- International Labour Organization. 2013. Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013: Memperkuat Peran Pekerjaan Layak dalam Kesetaraan Pertumbuhan. Jakarta: ILO.

- Kistanto, Ilham. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember. Jember: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. *Skripsi*.
- Kumar, Saten., Webber, Don J., and Perry Geoff. 2009. Real Wages, Inflation and Labour Productivity in Australia. *Department of Business Economics, Auckland University of Technology, New Zealand*.
- Lemos, Sara. 2004. The Effect of the Minimum Wage on Prices. *University of Leicester. Working Paper No. 04/7*.
- Lucas, Robert E., Jr., and Rapping, Leonard A. 2001. Real Wages, Employment, and Inflation. *Journal of Political Economy. Carnegie-Mellon University*.
- Mankiw, N. Greorgy. 2000. *Teori Makor Ekonomi*. Edisi Keempat. Alih Bahasa : Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga.
- Maqrobi, Syaiful., and Pujiati, Amin. 2011. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth: Testing For Causality. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1.
- Mehra, Y. P. 2000. Wage-Price Dynamics: Are They Consistent with Cost Push?. *Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond*, Vol. 86., 27-43.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohammadi, Ozra. 2014. Does Minimum Wage Cause Inflation in Iran?. *International J. Soc. Sci. & Education*. June-2014 Vol. 4 (Spesial Issue), ISSN: 2223-4934.
- Nasution, Mulia. 1997. *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Palley, Thomas I. 1999. The U .S. Inflation Process: Does Nominal Wage Inflation cause Price Inflation, Vica-versa, or Neither?
- Rizki, Perdana Kranti. 2012. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran (Studi Kasus Kota Kabupaten se-Jawa Timur Tahun

- 2006-2010). Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Ilmiah*.
- Sholeh, Maimun. 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah : Teori serta Beberapa Potret di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 4, No. 1*.
- Sisputro, Akbar. 2013. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungans Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. *Skripsi*.
- SMERU. 2008. Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU.
- Soetriono.2007. *Makro Ekonomi Dasar*. Jember:Universitas Jember.
- Solikin., and Sugema, Iman. 2004. Rigiditas Harga-Upah dan Implikasinya pada Kebijakan Moneter di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Sopianti, Ni Komang., and Ayuningsasi, A.A Ketut. (Tanpa Tahun). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Pengangguran di Bali. *E-Jurnal EP Unud, 2 (4): 216-225. ISSN: 2303-0178*.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar edisi ketiga*. PT.Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Susanti., Hera., Ikhsan, Moh., dan Widyanti. 1995. *Indikator-indikator Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutawijaya, Adrian., Zulfahmi. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8. Nomor 2, 85-101*.

- Tjahjono, Endy Dwi., Harmanta., Purwanto, Nur M. Adhi. 2012. Survey Measures of Inflation Expectation. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Utomo, Fajar Wahyu. 2013. Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah*.
- Wardhono, Adhitya. 2004. Mengenal Ekonometrika: Teori dan Aplikasi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widarti, Diah. 2006. Peranan Upah Minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
- Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. Semarang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. *Skripsi*.
- Zanetti, Attilio. 2005. Do Wages Lead Inflation? Swiss Evidence. *Swiss National Bank*. Boersenträsee 15, Postfach CH-8022 Zurich, Switzerland. Desember, 2005.
- Zulfahmi. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 8, No. 2, 85-101.

Sumber Internet:

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

**Lampiran A. Data Penelitian Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia****A. 1 Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Secara Nominal dan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan Tahun Dasar 2000**

<b>Tahun</b>	<b>UMP Jawa</b>	<b>UMP Luar Jawa</b>	<b>IHK</b>
	<b>Rupiah (Rp)</b>	<b>Rupiah (Rp)</b>	<b>Th dasar 2000</b>
<b>1997</b>	449000	215000	0,955956
<b>1998</b>	420800	220400	0,897321
<b>1999</b>	443000	243600	0,914532
<b>2000</b>	477100	283500	1
<b>2001</b>	517100	361100	1,125491
<b>2002</b>	587900	430800	1,238334
<b>2003</b>	629100	481700	1,300944
<b>2004</b>	656700	526600	0,527894
<b>2005</b>	691400	573400	0,618241
<b>2006</b>	747800	668400	0,659032
<b>2007</b>	763000	742400	0,702444
<b>2008</b>	859800	786900	0,514343
<b>2009</b>	900000	868600	0,528662
<b>2010</b>	945400	921500	0,565433
<b>2011</b>	986200	958300	0,586846
<b>2012</b>	1452400	1036800	0,612052
<b>2013</b>	1480100	1504000	0,663324
<b>2014</b>	2014000	2014000	0,537562

**A. 2 Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Secara Riil dan Inflasi**

Tahun	Inflasi	UMP Jawa		UMP Luar Jawa	
	(%)	Rupiah (Rp)	LOGUMP Jawa	Rupiah (Rp)	LOGUMP Luar Jawa
1997	11,05	469686,8443	5,671808396	224905,7272	5,352000515
1998	77,63	468951,3492	5,67112779	245619,9557	5,390263649
1999	2,01	484400,6421	5,68520471	266365,6804	5,425478268
2000	9,35	477100	5,678609417	283500	5,452553063
2001	12,55	459443,817	5,662232411	320837,6761	5,506285362
2002	10,03	474750,7496	5,676465659	347886,7545	5,541437894
2003	5,06	483571,8844	5,684461042	370269,5545	5,568518004
2004	6,4	1243998,622	6,094819899	997547,8521	5,998933738
2005	17,11	1118334,196	6,048571605	927470,1008	5,967299918
2006	6,6	1134693,852	6,054878702	1014214,189	6,006129682
2007	6,59	1086207,781	6,03591291	1056881,595	6,024026335
2008	11,06	1671648,744	6,223145026	1529914,395	6,184667131
2009	2,78	1702409,639	6,231064069	1643014,458	6,215641385
2010	6,96	1671991,675	6,223234111	1629723,216	6,212113852
2011	3,79	1680510,307	6,22544118	1632967,986	6,21297767
2012	4,3	2373000,133	6,375297763	1693973,105	6,228906511
2013	8,38	2231338,443	6,348565448	2267369,109	6,355522225
2014	8,36	3746547,731	6,57363127	3746547,731	6,57363127

**Lampiran B. Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi antara Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia**

**B.1 Hasil Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi (*Augmented Dickey Fuller*) Pada Inflasi di Indonesia**

a. Pada Tingkat Level (None)

Null Hypothesis: INFLASI\_\_\_\_\_ has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.465060	0.1286
Test critical values: 1% level	-2.728252	
5% level	-1.966270	
10% level	-1.605026	

b. Pada Tingkat Level (Intercept)

Null Hypothesis: INFLASI\_\_\_\_\_ has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.258880	0.0048
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

## c. Pada Tingkat Level (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: INFLASI\_\_\_\_\_ has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-12.02763	0.0000
Test critical values: 1% level	-4.667883	
5% level	-3.733200	
10% level	-3.310349	

## d. Pada Tingkat First Difference (None)

Null Hypothesis: D(INFLASI\_\_\_\_\_ ) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.008459	0.0000
Test critical values: 1% level	-2.728252	
5% level	-1.966270	
10% level	-1.605026	

## e. Pada Tingkat First Difference (Intercept)

Null Hypothesis: D(INFLASI\_\_\_\_\_ ) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.413901	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

f. Pada Tingkat First Difference (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: D(INFLASI\_\_\_\_) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.267366	0.0234
Test critical values: 1% level	-4.800080	
5% level	-3.791172	
10% level	-3.342253	

## B.2 Hasil Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi (*Augmented Dickey Fuller*) Pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Pulau Jawa

### a. Pada Tingkat Level (None)

Null Hypothesis: LOGUMP\_JAWA has a unit root  
 Exogenous: None  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.807567	0.9779
Test critical values: 1% level	-2.708094	
5% level	-1.962813	
10% level	-1.606129	

### b. Pada Tingkat Level (Intercept)

Null Hypothesis: LOGUMP\_JAWA has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.058289	0.9396
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

### c. Pada Tingkat Level (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: LOGUMP\_JAWA has a unit root  
 Exogenous: Constant, Linear Trend  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.111999	0.1347

Test critical values:	1% level	-4.616209
	5% level	-3.710482
	10% level	-3.297799

d. Pada Tingkat First Difference (None)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_JAWA) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.958051	0.0006
Test critical values:	1% level	-2.717511
	5% level	-1.964418
	10% level	-1.605603

e. Pada Tingkat First Difference (Intercept)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_JAWA) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.892517	0.0016
Test critical values:	1% level	-3.920350
	5% level	-3.065585
	10% level	-2.673459

f. Pada Tingkat First Difference (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_JAWA) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.867398	0.0071
Test critical values: 1% level	-4.667883	
5% level	-3.733200	
10% level	-3.310349	

### B.3 Hasil Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi (*Augmented Dickey Fuller*) Pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Pulau Luar Jawa

a. Pada Tingkat Level (None)

Null Hypothesis: LOGUMP\_LUAR\_JAWA has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.638039	0.9960
Test critical values: 1% level	-2.708094	
5% level	-1.962813	
10% level	-1.606129	

## b. Pada Tingkat Level (Intercept)

Null Hypothesis: LOGUMP\_LUAR\_JAWA has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.117436	0.9325
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

## c. Pada Tingkat Level (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: LOGUMP\_LUAR\_JAWA has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.538394	0.3081
Test critical values: 1% level	-4.616209	
5% level	-3.710482	
10% level	-3.297799	

## d. Pada Tingkat First Difference (None)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.969657	0.0057
Test critical values: 1% level	-2.717511	
5% level	-1.964418	
10% level	-1.605603	

## e. Pada Tingkat First Difference (Intercept)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.253248	0.0053
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

## f. Pada Tingkat First Difference (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.112457	0.0262
Test critical values:		
1% level	-4.667883	
5% level	-3.733200	
10% level	-3.310349	

**Lampiran C. Uji Kointegrasi (*Johansen Cointegration Test*)****C.1 Uji Kointegrasi pada Inflasi dan UMP Jawa**

## a. Nilai Kritis 1%

Date: 04/14/15 Time: 10:39  
 Sample (adjusted): 2000 2014  
 Included observations: 15 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_JAWA)  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.01 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	43.66183	19.93711	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	6.634897	0.0024

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.01 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	34.48201	18.52001	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	6.634897	0.0024

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## b. Nilai Kritis 5%

Date: 04/14/15 Time: 10:39  
 Sample (adjusted): 2000 2014  
 Included observations: 15 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_JAWA)  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	43.66183	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	3.841466	0.0024

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	34.48201	14.26460	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	3.841466	0.0024

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## c. Nilai Kritis 10%

Date: 04/14/15 Time: 10:40  
 Sample (adjusted): 2000 2014  
 Included observations: 15 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_JAWA)  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.1 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	43.66183	13.42878	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	2.705545	0.0024

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.1 Critical Value	Prob.**
None *	0.899621	34.48201	12.29652	0.0000
At most 1 *	0.457728	9.179814	2.705545	0.0024

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## C.2 Uji Kointegrasi pada Inflasi dan UMP Luar Jawa

### a. Nilai kritis 1%

Date: 04/14/15 Time: 10:40  
 Sample (adjusted): 2000 2014  
 Included observations: 15 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA)  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

#### Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.01 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	42.96249	19.93711	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	6.634897	0.0039

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

#### Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.01 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	34.62364	18.52001	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	6.634897	0.0039

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## b. Nilai Kritis 5%

Date: 04/14/15 Time: 10:41

Sample (adjusted): 2000 2014

Included observations: 15 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA)

Lags interval (in first differences): 1 to 1

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	42.96249	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	3.841466	0.0039

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	34.62364	14.26460	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	3.841466	0.0039

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## c. Nilai Kritis 10%

Date: 04/14/15 Time: 10:41  
 Sample (adjusted): 2000 2014  
 Included observations: 15 after adjustments  
 Trend assumption: Linear deterministic trend  
 Series: D(INFLASI\_\_\_\_) D(LOGUMP\_LUAR\_JAWA)  
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.1 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	42.96249	13.42878	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	2.705545	0.0039

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

## Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.1 Critical Value	Prob.**
None *	0.900564	34.62364	12.29652	0.0000
At most 1 *	0.426458	8.338849	2.705545	0.0039

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

**Lampira D. Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*)****D.1 Uji Kausalitas Granger pada Inflasi dan UMP Jawa**

a. Pada Lag 2

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:33

Sample: 1997 2014

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	15	2.09417	0.1739
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_JAWA)		0.21109	0.8132

b. Pada Lag 3

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:33

Sample: 1997 2014

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	14	1.76918	0.2403
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_JAWA)		0.42480	0.7414

## c. Pada Lag 4

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:34

Sample: 1997 2014

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	13	1.05325	0.4806
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_JAWA)		1.09185	0.4671

## d. Pada Lag 5

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:34

Sample: 1997 2014

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	12	205.386	0.0529
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_JAWA)		1.66915	0.5261

**D.2 Uji Kausalitas Granger pada Inflasi dan UMP Luar Jawa**

a. Pada Lag 2

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:37

Sample: 1997 2014

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_LUAR_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	15	2.87398	0.1032
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_LUAR_JAWA)		0.09712	0.9083

b. Pada Lag 3

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:37

Sample: 1997 2014

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_LUAR_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI____)	14	2.32791	0.1611
D(INFLASI____) does not Granger Cause D(LOGUMP_LUAR_JAWA)		0.11108	0.9509

## c. Pada Lag 4

## Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:38

Sample: 1997 2014

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_LUAR_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI_____)	13	1.04238	0.4844
D(INFLASI_____ ) does not Granger Cause D(LOGUMP_LUAR_JAWA)		0.39573	0.8044

## d. Pada Lag 5

## Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/14/15 Time: 11:38

Sample: 1997 2014

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LOGUMP_LUAR_JAWA) does not Granger Cause D(INFLASI_____)	12	1.15957	0.6043
D(INFLASI_____ ) does not Granger Cause D(LOGUMP_LUAR_JAWA)		38.7038	0.1214